



**KAITAN HUBUNGAN KERJA BKKBN DAN DUKUNGAN LEMBAGA  
PUSAT DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
TAKESRA (Tabungan Keluarga Sejahtera) KUKESRA (Kredit Usaha  
Keluarga Sejahtera) DI KEGAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**S K R I P S I**

Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S I )

Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

Asal	Hadiah	Klas
		352.0051
Terima Tel:	24 OCT 2000	YUA
No. Insk :	10 031 07/2000	R

Oleh :

Y u a n a

NIM : EIC195182

Pembimbing

Drs. R.K. Widjadi, SU

NIP. 130329041

Asisten Pembimbing

Drs. Budiyono, Msi

NIP. 131832304

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2000**

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2000  
Jam : 10.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua

(Prof. Drs. H. Toekidjan PS)  
NIP. 130 058 199

Sekretaris

(Drs. R.K. Widjadi, SU)  
NIP. 130 524 432

Anggota

1. Prof. Drs. H. Toekidjan PS
2. Drs. R.K. Widjadi, SU
3. Drs. Budiyono, Msi
4. Dra. Inti Wasiati
5. Drs. Anwar, Msi

Mengetahui  
a.n Dekan

Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



(Drs. Umaid Radi, MA)  
NIP. 130 239 058

**MOTTO**

*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan  
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang  
yang beruntung.*

*(QS Ali Imron: 104)*

*Barang siapa ditanya mengenai ilmu lalu ia menyembunyikannya (tidak mau  
menerangkan) maka ia akan dikekang pada hari  
kiamat dengan tali kendali neraka.*

*(HR. Abu Daud dan Turmudzi)*

*Persembahan*

*Tulus kupersembahkan karya ini kepada:*

- ⊖ *Papa Edyanto dan mama Endang Pertiwi*
- ⊖ *Buah hatiku Ryan Hidayatullah Al-Farouqy dan suamiku Rudy Eko Purnomo*
- ⊖ *Kakakku tercinta mbak Lia, mas Bowo, dan mbak Nita*
- ⊖ *Keponakanku tercinta Ayu "Naya", Egi, dan Nia "dagas"*
- ⊖ *Keluarga Tanggul tercinta Yaya Isang, mama Anik, Hendrik, Ziki, dan Artha*

## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIROHMAANIRROHIM

Alhamdulillah kami panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kaitan Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lembaga Pusat Dalam Menunjang Efektifitas Pelaksanaan Program Takesra Kukesra di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember".

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai tugas akhir bagi mahasiswa guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

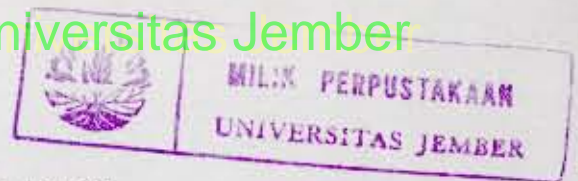
Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini berkat bantuan dari semua pihak, karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. R. K. Widjadi, SU dan bapak Drs. Budiyo, Msi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. H.M Toerki selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. Agus Budiharjo, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
4. Para PLKB di kecamatan Semboro khususnya bapak Slamet
5. Sahabat-sahabatku Pariyanto, Sulaiha, dan Santi, serta rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya skripsi ini

Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, September 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN MOTTO.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
1.4 Kerangka Teori.....	23
1.5 Konsepsi Dasar.....	30
1.6 Hipotesis.....	41
1.7 Definisi Operasional.....	45
1.8 Metode Penelitian.....	52
<b>BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN</b>	
2.1 Pengantar.....	53
2.2 Keadaan Geografis.....	57
2.3 Keadaan Demografis.....	61
2.4 Sarana dan Prasarana.....	64
2.5 Kantor Kecamatan Semboro.....	66
2.6 Struktur Organisasi BKKBN kecamatan.....	71
<b>BAB III PENYAJIAN VARIABEL PENELITIAN DAN HASIL PENGUKURAN</b>	
3.1 Pengantar.....	72

3.2 Variabel Independen (X).....	72
3.3 Variabel Dependen (Y).....	79
3.4 Variabel Intervening (Z).....	82

**BAB IV ANALISA DAN INTERPRETASI DATA**

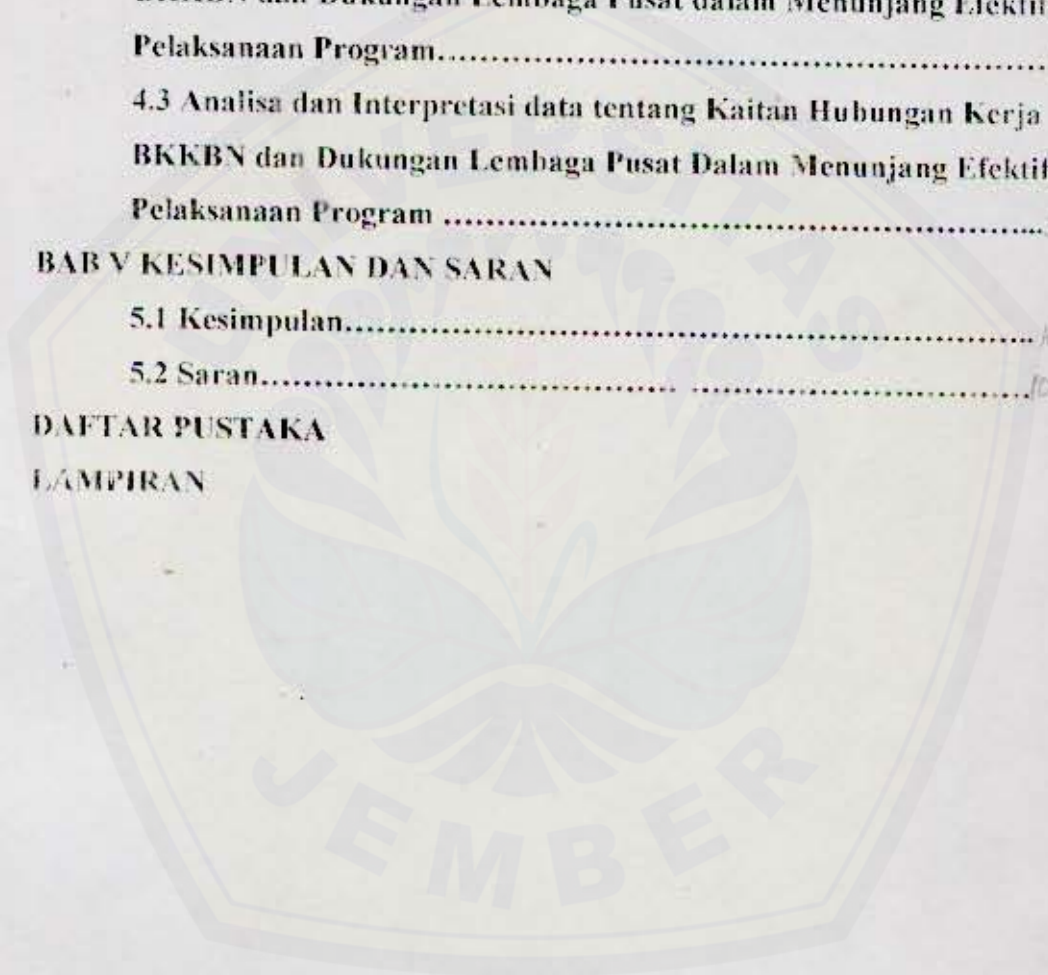
4.1 Pengantar.....	87
4.2 Analisa dan Interpretasi data tentang Kaitan Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lembaga Pusat dalam Menunjang Efektifitas Pelaksanaan Program.....	87
4.3 Analisa dan Interpretasi data tentang Kaitan Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lembaga Pusat Dalam Menunjang Efektifitas Pelaksanaan Program .....	95

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

TABEL

1. Laporan bulanan operasionalisasi Gerakan KB Nasional di tingkat kecamatan
2. Laporan kegiatan PKB/PLKB di kecamatan Semboro, kabupaten Jember
3. Komposisi penduduk menurut pendidikan
4. Jumlah penduduk menurut agama
5. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian
6. Sarana pendidikan yang ada di kecamatan Semboro, kabupaten Jember
7. Daftar inventaris barang di kantor kecamatan Semboro, kabupaten Jember
8. Skor pengukuran jawaban terhadap pengorganisasian
9. Skor pengukuran jawaban terhadap pelayanan Takesra Kukesra
10. Skor pengukuran jawaban terhadap pembinaan Takesra Kukesra
11. Kategori jawaban terhadap pengorganisasian (X1), pelayanan Takesra Kukesra (X2), pembinaan Takesra Kukesra (X3)
12. Skor pengukuran jawaban terhadap kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program dengan penyampaian pelayanan kepada anggota
13. Skor pengukuran jawaban terhadap kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota
14. Kategori jawaban terhadap kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program dengan penyampaian pelayanan kepada anggota (Y1) dan kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota (Y2)
15. Skor pengukuran jawaban terhadap bantuan
16. Skor pengukuran jawaban terhadap pengawasan
17. Kategori jawaban terhadap bantuan (Z1) dan pengawasan (Z2)
18. Total kategori jawaban terhadap hubungan kerja BKKBN(X) dan dukungan lembaga pusat (Z) dan efektifitas pelaksanaan program (Y)
19. Data untuk himpunan rangking yang hendak dikorelasikan
20. Himpunan rangking untuk variabel (X) dan variabel (Y)



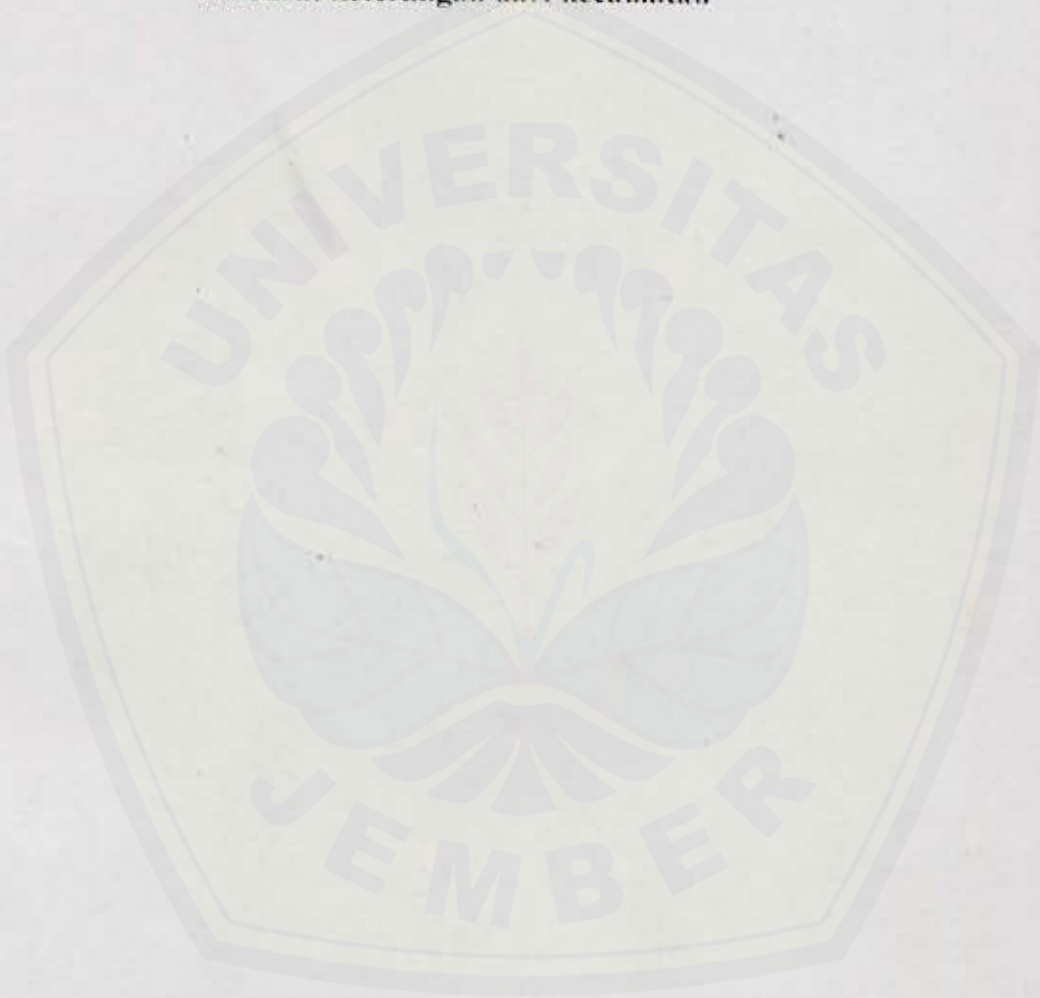
21. Himpunan rangking untuk variabel (Z) dan Variabel (Y)
22. Himpunan rangking untuk variabel (Z) dan variabel (X)
23. Prosentase jawaban responden dari variabel hubungan kerja BKKBN
24. Prosentase jawaban responden dari variabel efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra
25. Prosentase jawaban responden dari variabel dukungan lembaga pusat
26. Analisa data variabel (X), variabel (Y), variabel (Z)



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran**

- I. Daftar Pertanyaan (kuesioner)
- II. Permohonan ijin penelitian dari LPM UNEJ
- III. Ijin penelitian dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Jember
- IV. Surat keterangan dari kecamatan



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dalam usaha pelaksanaan pembangunan nasional tersebut telah tercantum dalam visi GBHN 1999 yaitu:

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin” (1999:15)

Yang selanjutnya untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi-misi dalam GBHN 1999 yang diantaranya adalah perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat A. Mongid (1996:1) yang menyatakan:

“Penduduk tidak lagi dilihat sebagai faktor produksi bersama-sama dengan faktor produksi yang lain dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi mereka dilihat sebagai produsen, sumber pemikiran dan sumber motivasi pembangunan”.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan, oleh sebab itu prioritas pembangunan lima tahun ke VI yang tetap

bertumpu pada pembangunan dibidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan yang lain makin perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan merupakan usaha perbaikan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hasil- hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada di pedesaan, maka sudah sewajarnya kalau pembangunan dititik beratkan kepada masyarakat pedesaan. Adapun pembangunan masyarakat pedesaan ini merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan hidup masyarakat tersebut dalam artian material dan spiritual.

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang sebagian besar miskin, dalam pengertian miskin adalah miskin sumberdaya. Oleh kerananya bantuan pemerintah utamanya dana sangat penting bagi lapisan masyarakat miskin dipedesaan. Kurangnya kualitas masyarakat di pedesaan tersebut dapat ditandai dengan salah satunya yaitu pendataan keluarga pada tahun 1995 diperoleh gambaran bahwa kurang lebih 56 % keluarga yang ada di Indonesia masih belum mampu berkembang sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan bagi keluarganya sendiri.

Dengan melihat kenyataan diatas, selanjutnya menurut Sudono Sukirno seperti yang dikutip oleh Drs. R.K Widjadi (1987) menyatakan bahwa untuk menciptakan pembangunan diperlukan berbagai jenis sumber daya. Pertama-tama modal yang berupa dana perlulah disediakan untuk membiayai proyek-proyek swasta maupun pemerintah yang akan digunakan. Selanjutnya harus tersedia pula pengusaha-pengusaha yang cakap tenaga pimpinan perusahaan (manager), tenaga ahli dibidang teknik dan berbagai bidang lainnya, tenaga administrasi pemerintahan maupun pekerja-pekerja yang terlatih yang akan menggunakan dana-dana yang

tersedia untuk merealisasi pembinaan proyek-proyek tersebut, atau dengan kata lain pembangunan hanya akan timbul apabila kedua jenis modal tersebut yaitu modal berupa dana dan modal manusia dikoordinasikan untuk menciptakan proyek-proyek yang diciptakan tersebut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Keppres No. 17/ 1994 sekurang-kurangnya ada lima jenis program dan kebijakan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa antara lain:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan cara menyelenggarakan pentransferan sumber-sumber pemerintah dari pusat ke daerah dalam bentuk inpres.
- b. Mempermudah dan meningkatkan akses kaum miskin terhadap berbagai bentuk pelayanan modal seperti pendidikan, Kesehatan, KB, air bersih, sanitasi, dsb.
- c. Perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil seperti KURK, KCK, dsb.
- d. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya infrastruktur pertanian.
- e. Pengembangan kelembagaan di daerah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan seperti pengembangan wilayah terpadu, program peningkatan petani atau nelayan kecil, program IDI, dsb.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut keluarga memegang peranan yang sangat penting, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang ikut menentukan kualitas sumber daya manusia. Mengenai peranan keluarga tersebut A. Mongid (1996:2) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Dari hasil pendataan keluarga tahun 1995 diperoleh gambaran bahwa kurang lebih 56 % keluarga yang ada di Indonesia masih belum mampu berkembang sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan bagi anggotanya sendiri, karena mereka masih belum mampu atau baru sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Mereka masih berada pada fase keluarga pra sejahtera atau keluarga sejahtera I. Mereka masih belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, apalagi kebutuhan pengembangannya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya – upaya untuk mengentaskan mereka dari ketertinggalannya itu. Karena penyebab ketertinggalan itu lebih dari 70 %

karena faktor ekonomi maka diperlukan program penanggulangan kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I ini. (A. Mongid : 1)

Berdasar pendapat diatas, keluarga-keluarga tersebut masih dalam keadaan belum mampu atau baru sebatas dapat memenuhi kebutuhan fisik minimalnya saja. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dalam memenuhi kebutuhan lain yang diperlukan untuk mencapai tahapan keluarga yang lebih tinggi agar menjadi wahana pembangunan bangsa belum dapat seluruhnya terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan keluarga-keluarga tersebut tidak dapat berperan secara optimal dalam pembangunan.

Mengingat jumlah keluarga yang memerlukan bantuan dan pemberdayaan tersebut sebagian besar ada didaerah pedesaan, maka pada tanggal 29 Juni 1995 dicanangkan gerakan pembangunan keluarga sejahtera didaerah pedesaan, dengan mencanangkan "Gerakan Bangga Suka Desa". Untuk mengisi pembangunan desa lebih lanjut dianjurkan keluarga Indonesia me.abung dan memperbaiki seluruh fungsi keluarga yang ada mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan rekannya dikota, mampu menjadi agen-agen pembangunan yang handal, mandiri, dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk membangun secara berkelanjutan.

Pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan mayoritas pedesaan ini pada tanggal 2 Oktober 1995 mengeluarkan inpres untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Untuk desa tertinggal ditugaskan kepada menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas melalui program IDT, dengan inpres No. 5 Tahun 1993
2. Untuk desa tidak tertinggal ditugaskan kepada Menteri Kependudukan/ Kepala BKKBN dengan program pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Gerakan Takesra ( Tabungan Keluarga Sejahtera) yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 1996 (Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Pengantasan Kemiskinan, BKKBN;1996:3)

Program pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah usaha pemberdayaan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonominya. Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Membantu keluarga agar mau dan mampu mengembangkan kegiatan kewirausahaan
2. Membantu keluarga agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan kewirausahaan terutama dalam hal teknologi dan pemasaran
3. Membantu keluarga agar mau dan mampu menguasai teknologi dan memanfaatkan modal melalui Gerakan Takesra (Tabungan Kesejahteraan Keluarga) dan memanfaatkan Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) (A. Mongid:1996:7).

Berdasarkan uraian diatas untuk menumbuhkembangkan kegiatan kewirausahaan dan kemitrausahaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, maka penggalan dana dan penggalangan dana serta pemupukan modal usaha memegang peranan penting. Oleh karena itu untuk mewujudkan kegiatan kewirausahaan dan kemitrausahaan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan dana Kukesra, sedangkan untuk memperoleh dana Kukesra, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tersebut harus memiliki Takesra terlebih dahulu. Dengan demikian salah satu intervensi penting dari pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan adalah pelaksanaan program Takesra Kukesra.

Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) adalah salah satu produk simpanan yang dimaksudkan untuk menampung dana keluarga dan masyarakat guna mendukung pembangunan keluarga sejahtera yang fasilitas dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah disepakati oleh penabung dan penyelenggara. Alasan pemerintah dengan penggalan dan penggalangan dana melalui tabungan tersebut secara tradisi merupakan kebiasaan masyarakat untuk

menyimpan dan mengumpulkan uang guna mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi keluarga dikemudian hari. (Petunjuk Bersama Pelaksanaan Takesra Kukesra BKKBN: 1997:2). Selain itu Takesra dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, yaitu Kukesra. Jadi untuk memperoleh Kukesra syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah menjadi anggota Takesra. Dengan demikian Kukesra (Kredit usaha keluarga sejahtera) adalah kredit lunak yang diberikan kepada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang tinggal di desa tidak tertinggal yang tergabung dalam kelompok Takesra.

Pemberdayaan keluarga melalui Takesra Kukesra diartikan sebagai pengembangan potensi keluarga terutama dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang dianggap paling lemah dan memiliki potensi yang belum banyak digunakan, yaitu para ibu, khususnya dari keluarga sasaran yaitu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Untuk mengorganisasikan pelaksanaan takesra Kukesra, disetiap tingkatan wilayah yaitu pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan dibentuk kelompok kerja teknis Takesra Kukesra (pokjanis Takukesra), yang anggota-anggotanya adalah unsur-unsur dari BKKBN, Bank BNI, P.T Pos Indonesia dan Yayasan Sejahtera mandiri serta unsur lainnya yang dianggap perlu dan terkait.

Pelayanan Takesra Kukesra diberikan melalui Kantor Pos Pelaksana (KPP dan KPTB). Setiap keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada dasarnya mendapat bantuan Takesra sebesar Rp. 2000,- sebagai saldo awal yang telah dibayarkan oleh pengusaha nasional kelompok Jimbaran. Pelaksanaan Takesra dilakukan secara berkelompok, sehingga dalam rekening Takesra tersimpan atas nama ketua kelompok. Dalam melakukan transaksi Takesra ketua kelompok bertindak atas persetujuan anggota kelompok. Demikian pula apabila kelompok memerlukan bantuan modal untuk berwirausaha melalui Kukesra, peminjamannya juga dilakukan secara berkelompok.



Berdasarkan pada uraian diatas jelaslah bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Takesra Kukesra adalah peningkatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga dengan menumbuhkembangkan kemandirian keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I dalam berwirausaha. Dalam buku V Petunjuk Umum Pengembangan Kewirausahaan, menyebutkan tentang kewirausahaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan melakukan setiap kesempatan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk memperoleh keuntungan.

Jadi sasaran utama dari pelaksanaan Takesra Kukesra adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang ada didesa non IDT atau kelurahan, agar memiliki sikap dan perilaku serta semangat berwirausaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan. Mengenai pengertian Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I akan dijelaskan sebagai berikut:

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal seperti kebutuhan spiritual, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan pengertian Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi". (Panduan BKKBN:1996:4)

Berdasar pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Takesra Kukesra, maka diperlukan langkah-langkah yang terarah menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan terhadap pelaksanaan Takesra Kukesra dapat dikatakan sebagai pelaksanaan yang efektif. Dengan kata lain efektifitas dari pelaksanaan Takesra Kukesra dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rencana pelaksanaan Takesra dan Kukesra

Sebagaimana yang dinyatakan oleh H. Emerson (Handyaningrat, 1988:167) tentang pengertian efektifitas yaitu:

“ Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tercapainya tujuan adalah efektif sebab merupakan efek atau pengaruh yang besar terhadap yang dikehendaki”.

Berdasarkan pendapat dan uraian Emerson diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Takesra Kukesra dapat dikatakan efektif apabila pemberdayaan keluarga sasaran melalui kemandirian berwirausaha dapat tercapai adanya. Agar Takesra Kukesra sebagai salah satu intervensi dari program pembangunan Keluarga Sejahtera dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan yaitu sebagai pemberdayaan keluarga, maka perlu kiranya dipedomani prinsip prinsip penting sebagaimana yang tercantum dalam buku “Petunjuk Umum Pengelolaan Takesra Kukesra (BKKBN, 1996:32) sebagai berikut:

1. Modal usaha dari Kukesra harus digunakan untuk tujuan usaha produktif, bukan untuk tujuan konsumtif
2. Setiap keluarga yang namanya tercantum dalam permohonan Kukesra harus dapat menerima dan memanfaatkan kredit tersebut
3. Menghindari penggunaan pinjaman hanya oleh sebagian kelompok yang dianggap mampu mengelola dana tersebut sedangkan yang lain hanya menerima keuntungannya
4. Menghindari penggunaan dana pinjaman Kukesra sebagai tambahan usaha simpan pinjam sedangkan anggota kelompok yang menandatangani permohonan kredit hanya dijanjikan mendapat sebagian dari keuntungan pada masa mendatang (sleeping partner)

Prinsip diatas harus benar-benar menjadi dasar dalam pelaksanaan Takesra Kukesra agar dapat berjalan efektif sebagaimana yang telah ditentukan. Keefektifan itu dapat diukur dari penggunaan dana Kukesra oleh keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera dalam menciptakan usaha produktif dan mandiri (berwirausaha) sehingga efektifitas dari pelaksanaan Takesra Kukesra dapat dilihat melalui

banyaknya jumlah usaha produktif keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menerima Takesra Kukesra.

Menyinggung masalah efektifitas pelaksanaan Takesra Kukesra di kecamatan semboro telah maksimal. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I di kecamatan Semboro adalah sebanyak 1235 KK yang juga termasuk sebagai penerima dan pengguna dana Takesra Kukesra yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan 37 KK yang termasuk dalam tahapan Keluarga Sejahtera II, III, dan III plus juga menerima dana Takesra Kukesra. Artinya penerima dana Takesra Kukesra di Kecamatan semboro seluruhnya dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Gerakan Takesra Kukesra dikecamatan Semboro sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga akan berhasil apabila khalayak sasarannya yaitu Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I dapat memanfaatkan dana Kukesra untuk kegiatan usaha produksi sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh petugas KB melalui ceramah-ceramah, penyuluhan maupun pengarahan dan konsultasi.

Jumlah 1235 KK Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan 37 KK Keluarga Sejahtera II, III, dan III plus itu dalam pelaksanaan Takesra Kukesra dikecamatan Semboro dibagi dalam kelompok-kelompok usaha menurut lingkungan RT masing-masing. Dimana kelompok-kelompok itu dimaksudkan sebagai wadah pembinaan anggota kelompok dan saling bertukar pikiran tentang usaha produktif yang dilakukan baik dengan sesama anggota kelompok maupun dengan petugas KB.

Sampai saat ini ( sejak pelaksanaan Takesra Kukesra yaitu sejak tahun 1996) sampai tahun 2000 dari data yang penulis peroleh telah banyak Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu kurang lebih sebanyak 600 KK yang tergabung dalam 60 UPPKS yang sudah dapat mengalokasikan atau memanfaatkan dana Kukesra sebagai modal usaha produktif. Dengan satu catatan bahwa kelompok-kelompok usaha penerima Takesra Kukesra itu ada setelah mereka menerima bantuan usaha dari adanya gerakan Takesra kukesra. Artinya kelompok-kelompok

usaha tersebut sebelumnya belum pernah ada sebelum gerakan Takesra Kukesra dikecamatan Semboro kabupaten Jember. Dengan demikian dapat diketahui sejauhmana keluarga-keluarga penerima dan pengguna Takesra Kukesra tersebut mengalokasikan atau memanfaatkan bantuan usaha melalui Gerakan Takesra Kukesra untuk kegiatan usaha produktif begitu juga pada saat pengembalian dana tersebut. Kenyataan ini dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut.



Tabel 1. Data yang menunjukkan Efektifitas Pelaksanaan Program Takesra Kukesra dan adanya Dukungan Lembaga Pusat di Kec. Semboro, Kab. Jember

	Urutan	Tahapan Keluarga Sejahtera				Jumlah
		Kel Pra Sej	KS I	Jml	KS II, III, dan III plus	
1	Jumlah keluarga sebagai anggota UPPKS	852	383	1235	37	1272
2	Jumlah keluarga sebagai anggota UPPKS yang masih PUS	678	321	999	35	1034
3	Juml. Ang. Kel. Shg. Angg. UPPKS yang masih PUS mjd peserta KB	600	274	874	26	900
4	Jml Angg. UPPKS yang					
	a. yg berusaha	769	367	1136	37	1173
	b. tdk berusaha	83	16	99	-	99
5	Jml pinjaman - bunga					
	a. Kukesra					Rp 130.736.961,
	b. BUMN					Rp 2.000.000,-
	c. KPKU/KPTG					
	d. Lain-lain					
6	Jml. Pinjaman+ bunga yg seharusnya dikembalikan sampai dengan bulan ini					

7	a. Kukesra					Rp
	b. BUMN					97.754.489,-
	c. KPKU/KPTG					Rp
	d. Lain-lain					2.000.000,-
8	Jml. Pinjaman + bunga yg sudah dikembalikan sampai dengan bln ini					
	a. Kukesra					Rp
	b. BUMN					95.090.641,-
	c. KPKU/KPTG					Rp
9	d. Lain-lain					2.000.000,-
	Jml. Sisa pinj + bunga					
	a. Kukesra					Rp
	b. BUMN					34.846.320,-
9	c. KPKU/KPTG					
	d. Lain-lain					
	Jml. Angg. UPPKS yang sedang menggunakan Kukesra					
	a. Putaran I				572	
	b. Putaran II				210	
	c. Putaran III				163	
	d. Putaran IV				250	
	e. Putaran V				16	

Sumber: Laporan Bulanan operasionalisasi Gerakan KB Nasional ditingkat kecamatan, bulan Maret 2000.  
BKKBN Kec. Semboro, Kab. Jember

Dari Tabel 1 diatas dapat kita interpretasikan sebagai berikut:

Bahwa tabel 1 diatas menunjukkan adanya bukti yang dapat kita lihat dari data yang bisa dilihat yaitu tingkat efektifitas dan adanya dukungan yang diberikan oleh lembaga pusat dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra.

## 1. Efektifitas Pelaksanaan Program Takesra Kukesra

Di kecamatan Semboro pelaksanaan program Takesra Kukesra sudah efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 pada uraian no 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penjelasan mengenai uraian no:

1. Bahwa dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra, anggota masyarakat yang menerima dan menabung dibagi dalam kelompok-kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dimana anggota perkelompok antara 15-25 orang.

Disini terlihat bahwa jumlah keluarga sebagai anggota UPPKS adalah sebanyak 1272, yang dalam hal ini terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera dengan perincian sebagai berikut:

keluarga Pra Sejahtera : 852 KK

Keluarga Sejahtera I : 383 KK

dan Keluarga sejahtera II, III dan III plus yaitu 37 KK

2. Selanjutnya Karena program Takesra Kukesra adalah program yang dicetuskan oleh BKKBN untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari gerakan KB nasional maka anggota keluarga sebagai anggota UPPKS juga dibagi dalam kategori PUS (pasangan Usia Subur) dimana PUS tersebut terdiri dari tahapan-tahapan keluarga Sejahtera dengan perincian sebagai berikut:

Keluarga Pra Sejahtera : 678 KK

Keluarga Sejahtera I : 321 KK

Keluarga Sejahtera II, III dan III plus: 35 KK

3. Selanjutnya pada uraian no 3 dapat dijelaskan bahwa anggota keluarga sebagai anggota UPPKS yang masih tergolong dalam Pasangan Usia Subur dapat dibedakan antara yang ikut KB dan yang tidak ikut KB, dalam tabel 1 uraian 3 terlihat sebagian besar telah ikut KB yaitu 900 anggota keluarga dari 1034 anggota keluarga dengan perincian sebagai berikut:

Keluarga Pra Sejahtera 600 KK

Keluarga Sejahtera I : 274 KK

Keluarga Sejahtera II, III dan III plus : 26 KK

4. Uraian pada tabel 1 no 4 menjelaskan efektif tidaknya program Takesra Kukesra yaitu pada Kukesra tujuan kredit yang dikucurkan adalh untuk digunakan sebagai modal usaha oleh penerima Kukesra . Sehingga dapat dilihat anggota UPPKS yang berusaha dan yang tidak berusaha dengan asumsi yang berusaha maka pendapatannya dapat meningkat sedangkan yang tidak berusaha maka pendapatannya juga tidak meningkat. Hal ini dapat dilihat yaitu: yang berusaha sebanyak 1173 KK dan yang tidak berusaha sebanyak 99 KK

7. Selanjutnya masih juaga untuk melihat efektifitas dari pelaksanaan program Takesra Kukesra yaitu dengan melihat jumlah kredit yang dikembalikan sehingga anggota UPPKS dapat mengajukan kredit pada putaran berikutnya dengan jumlah yang lebih besar sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

dana Kukesra yang sudah dikembalikan yaitu Rp. 95.090.641,- dari jumlah Rp. 97.754.489 yang seharusnya dikembalikan Sedangkan dana kredit yang dipinjamkan dari BUMN dapat lunas dikembalikan.

8. Selanjutnya uraian no 8 hanya memperkuat data sebelumnya khususnya no 7 dan no 5 bahwa sisa pinjaman Kukesra adalah sebesar Rp. 34. 846.320,-

9.Uraian no 9 menjelaskan mengenai para anggota UPPKS yang menggunakan dana Kukesra dengan melihat putaran dana tersebut dengan rincian sebagai berikut

a. Putaran I :572 KK



- b. Putaran II: 210 KK
- c. Putaran III: 163 KK
- d. Putaran IV: 250 KK
- e. Putaran V: 16 KK

Sehingga apabila ditotal yaitu 1211 KK yang menggunakan Kukesra dari 1272 yang menunjukkan bahwa dana Kukesra memang dibutuhkan oleh masyarakat , sedangkan 61 KK hanya mengikuti Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera)

## 2. Dukungan Lembaga Pusat

Dukungan Lembaga pusat yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan dan pengawsan dalam hal ini bantuan lembaga pusat dapat kita lihat pada tabel I uraian no. 5 dimana lembaga pusat mengucurkan dana untuk pelaksanaan program Takesra Kukesra di kecamatan Semboro sebesar Rp. 130.736.961,-. selain itu juga BUMN membantu dengan memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,-.

Berdasar pada Tabel 1 terlihat bahwa pemanfaatan Takesra Kukesra di Kecamatan Semboro telah berjalan efektif sebagaimana yang telah direncanakan. Rata-rata yaitu 92% dapat mengalokasikan dan memanfaatkan dana untuk dijadikan sebagai modal usaha. Sedangkan hanya 8% KK yang masih belum dapat mengalokasikan dan memanfaatkan dana untuk kegiatan berwirausaha. Dengan demikian walaupun dapat dikatakan efektif, tetapi kegiatan yang bersifat membina dan mengarahkan tetap perlu dikembangkan pada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada pemberdayaan keluarga dan anggotanya yang mengacu pada pemikiran untuk menghilangkan sebab-sebab terjadinya kemiskinan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan yang sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program Takesra kukesra adalah kaitan hubungan kerja dari BKKBN (yang dalam hal ini BKKBN menitikberatkan pada peran para PKB (Petugas Keluarga Berencana atau PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)) dan juga dukungan dari lembaga pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mengelola variabel hubungan PKB/PLKB dan dukungan lembaga pusat yang perlu dimantapkan. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat dari Benhard (dalam Soeryono Soekamto, 1987:147) bahwa: "Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya".

BKKBN adalah lembaga pemerintah nondepartemen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan tugas badan ini adalah membantu menekan laju pertumbuhan penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi merupakan suatu masalah yang perlu diatasi, sehingga jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan disegala bidang.

Namun dilain pihak laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi serta jumlah penduduk yang terlalu besar dapat menjadi beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi hasil pembangunan yang akan dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dan sekaligus memanfaatkannya jumlah penduduk yang besar guna meningkatkan pembangunan maka langkah yang ditempuh dalam bidang kependudukan maka perlu diperluas dan diintegrasikan peranan lembaga BKKBN agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat mempercepat tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Selain itu, tugas BKKBN adalah menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera untuk seluruh penduduk Indonesia dan untuk menciptakan cita-cita tersebut, banyak usaha yang dilakukan diantaranya adalah melalui program Takesra Kukesra.

Program Takesra Kukesra adalah upaya pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan yang berdasar pada pemberdayaan keluarga utamanya keluarga yang masih tertinggal, yaitu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk mengentaskan diri mereka dari keterbelakangan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Takesra Kukesra, di setiap tingkatan wilayah dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kodya, dan tingkat kecamatan dibentuk kelompok kerja teknis Takesra Kukesra (pokjanis Takukesra), yang anggota-anggotanya adalah unsur-unsur dari Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN, Bank BNI, PT. Pos Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, serta unsur lain yang dianggap perlu dan terkait. Karena lokasi penelitian penulis adalah di tingkat kecamatan maka akan dijelaskan susunan pokjanis ditingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Camat
- Sekretaris : PPLKB
- Anggota : Kepala Kantor Pos  
Pemimpin Kanto: Cabang Pembantu BNI  
PKB/PLKE  
Kaur Kesra  
Kaur PMD  
Tim Penggerak PKK

Sedangkan tugas dan fungsi pokok Pokjanis ditingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana operasional pelaksanaan kegiatan Takesra Kukesra ditingkat kecamatan sesuai dengan arahan dari tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/ kodya
2. Melaksanakan orientasi, pemantauan dan bimbingan teknis ditingkat kecamatan
3. Melakukan upaya-upaya untuk peningkatan dan pemasyarakatan Takesra Kukesra
4. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang diperlukan penyelenggaraan bagi penyelenggaraan Takesra Kukesra secara efektif dan efisien ditingkat desa dan kelompok
5. Mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan Takesra Kukesra
6. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Takesra Kukesra
7. Melaksanakan umpan balik/ evaluasi kegiatan Takesra Kukesra dikelompok-kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

Dengan demikian keberhasilan akan program ini sangat ditentukan oleh kepedulian dan peran serta semua pihak yang memiliki potensi guna membantu keluarga-keluarga tertinggal tersebut, terutama yang terkait dengan pelaksanaan Takesra Kukesra. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang penting adalah para PKB (Penyuluh Keluarga Berencana)/PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), pada diri mereka ini diharapkan dapat ditumbuhkembangkan suasana yang mendukung bagi pelaksanaan Takesra Kukesra sehingga program tersebut dapat terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel II dibawah ini yang menunjukkan kegiatan PKB/PLKB.

Tabel II. Laporan kegiatan PKB/PLKB dan PPKBD di kec. Semboro, kab. Jember

No	Uraian	PLKB/PKB	PPKBD
1	Mengikuti Rakor desa		1 kali
2	Mengadakan pertemuan		4 kali
3	dengan kader		6 kali
4	Mengunjungi kader	3 kali	
5	Ikut pertemuan di kecamatan	1 kali	
6	Rakor GKBN	8 kali	
	Pembinaan ke PPKBD/ sub	-	
7	PPKBD/Kel. KB/ dasawisma		
8	Kegiatan TKBK	2 kali	
9	Kegiatan penyuluhan oleh PLKB	-	
	Keg. Pemutaran film oleh BKKBN		

Sumber: Laporan bulanan kegiatan PKB/PLKB dan PPKBD bulan Maret 2000

Dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh PKB/PLKB dalam hubungannya dengan pelaksanaan Takesra Kukesra antara lain menyangkut tentang:

1. PKB/PLKB menyampaikan dan membahas rencana-rencana pengorganisasian usaha-usaha produktif Takesra Kukesra
2. Menyampaikan seperlunya semangat dan kemampuan kemitrausahaan penerima Takesra Kukesra yang dilakukan pada saat penyuluhan kelompok
3. Penyampaian dan pembinaan perlunya perilaku produktif dalam memanfaatkan dana Kukesra

4. Peningkatan hubungan PKB dan Deperindag dalam ceramah khusus dan tanya jawab tentang perlunya peningkatan kualitas produksi yang memperhatikan pangsa pasar

Kebutuhan rakyat miskin biasanya tidak dapat dipenuhi apabila organisasi lokal saja yang diserahi mengurus sendiri, masih dibutuhkan bantuan dari pusat yang umumnya berupa sumber dana. Oleh karena itu kaitan hubungan kerja antara BKKBN dan dukungan lembaga pusat sangat diperlukan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan program yaitu berdampak menimbulkan partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pendapat David K. Leonard yang dikutip dalam laporan penelitian Drs. R.K Widjadi, SU yaitu:

“Untuk menagani program semacam diatas, diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga atau oraganisasi yang menanganinya, yaitu lembaga pusat dan lembaga pelaksana”.

Hubungan ini merupakan mekanisme yang saling terikat dan saling mempengaruhi antara lembaga/ badan/ organisasi satu sama lain yang selanjutnya oleh David K. Leonard diberi istilah linkages. Mekanisme hubungan organisasi atau linkages tadi perhatiannya ditujukan kepada:

1. Badan/ lembaga yang berhubungan dan berkaitan dengan pembangunan pedesaan
2. Dan jenis program yang akan menguntungkan masyarakat pedesaan.

Jadi dalam rangka pelaksanaan program Takesra Kukesra menyangkut hubungan/ linkages yang meliputi pada pemusatan isi program yang akan dilaksanakan, serta lembaga/ organisasi BKKBN setempat, dan hubungan pusat (seperti Bank BNI, PT. Pos Indonesia, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan instansi lain yang terkait) yang nampaknya lebih sesuai dengan program diatas. Dalam hal ini Bank BNI dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri memegang peranan penting dalam usaha melancarkan program Takesra Kukesra yang menyangkut tentang dana perkreditan. Demikian pula dengan P.T Pos Indonesia yang menyangkut tentang pelayanan Takesra Kukesra.

Sehingga kaitan hubungan kerjasama antara BKKBN yang dalam hal ini menitikberatkan pada peran PKB/PLKB dan lembaga pusat sebenarnya menunjukkan adanya dua fungsi pokok yakni adanya pengawasan dan adanyabantuan.

Dalam membahas hubungan organisasi ini yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan baik oleh lembaga pusat maupun lembaga lokal untuk mendorong BKKBN agar dapat memberikan pelayanan kepada rakyat miskin. Jadi bukannya hasil apakah yang diinginkan, melainkan tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan masalah hubungan/ linkages sebagaimana tersebut diatas, maka BKKBN dituntut agar melaksanakan program organisasi secara efektif ( dalam hal ini tergantung pada peranan PKB/ PLKB dan dukungan lembaga pusat yang tergabung dalam pokjanis)

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul:

“Kaitan hubungan kerja EKKBN dan dukungan lembaga pusat dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra di kecamatan Semboro, Kabupaten Jember”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pada hakekatnya suatu penelitian yang dilaksanakan manusia itu karena dorongan rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia. Rasa ingin tahu timbul karena manusia menemukan suatu masalah sekaligus merupakan suatu tantangan dan harus dipecahkan. Masalah yang akan dipecahkan dalam suatu penelitian merupakan langkah awal yang harus dipahami oleh peneliti. Dalam hal ini Winarno Surahmad mendefinisikan masalah sebagai berikut:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.” (1983:34)

Untuk memperoleh masalah yang lebih spesifik, Allen memberikan persyaratan tentang suatu masalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hubungan antara dua variabel atau lebih
2. Persoalan harus lugas dalam bahasa yang jelas dan mudah dituangkan dalam kalimat tanya
3. Persoalan harus memungkinkan pengukuran yang empiris

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis kemukakan mengenai pelaksanaan program Takesra Kukesra dikecamatan Semboro, kabupaten Jember bahwa pelaksanaan program tersebut telah efektif. Hal ini erat kaitannya dengan kaitan hubungan kerja BKKBN sebagai unit pelaksana Takesra Kukesra dan dukungan lembaga pusat. Sehingga penerima Takesra kukesra memahami bagaimana mereka memanfaatkan tambahan modal yang diduplikannya dari Kukesra bagi pemberdayaan keluarganya melalui pengembangan usaha mereka.

Bertolak dari definisi dan syarat dari masalah serta uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana kaitan hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra dikecamatan Semboro, kabupaten Jember? ”

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Setiap manusia yang melakukan aktivitas atau pekerjaan apa saja pasti mempunyai tujuan. Demikian pula dengan suatu organisasi, sebelumnya peneliti kemukakan pendapat dari Sutisno Hadi sebagai berikut:

“ Suatu research, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau mengadakan pengujian terhadap suatu ilmu pengetahuan ”. (1991:30)



Berpijak dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menguji kebenaran suatu ilmu dan menemukan pengetahuan yang ada. Dan tujuan penelitian yang ingin penulis ketahui antara lain:

1. Ingin mengetahui sejauhmana kaitan hubungan kerja BKKBN dan lembaga pusat dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra dikecamatan Semboro, kabupaten Jember.
2. Ingin mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra dikecamatan Semboro, kabupaten Jember.

### 1.3.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa lebih lanjut.
2. Bagi BKKBN khususnya BKKBN kecamatan Semboro, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga untuk menunjang keberhasilan program sehingga memberikan manfaat terhadap masyarakat.

## 1.4 Kerangka Teori

### Pembangunan dan Efektifitas Pelaksanaan Program

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di pedesaan, maka sudah sewajarnya kalau dititikberatkan kepada masyarakat pedesaan. Adapun pembangunan masyarakat desa ini merupakan suatu bentuk

tindakan kolektif suatu masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan hidup masyarakat tersebut dalam artian material dan spiritual

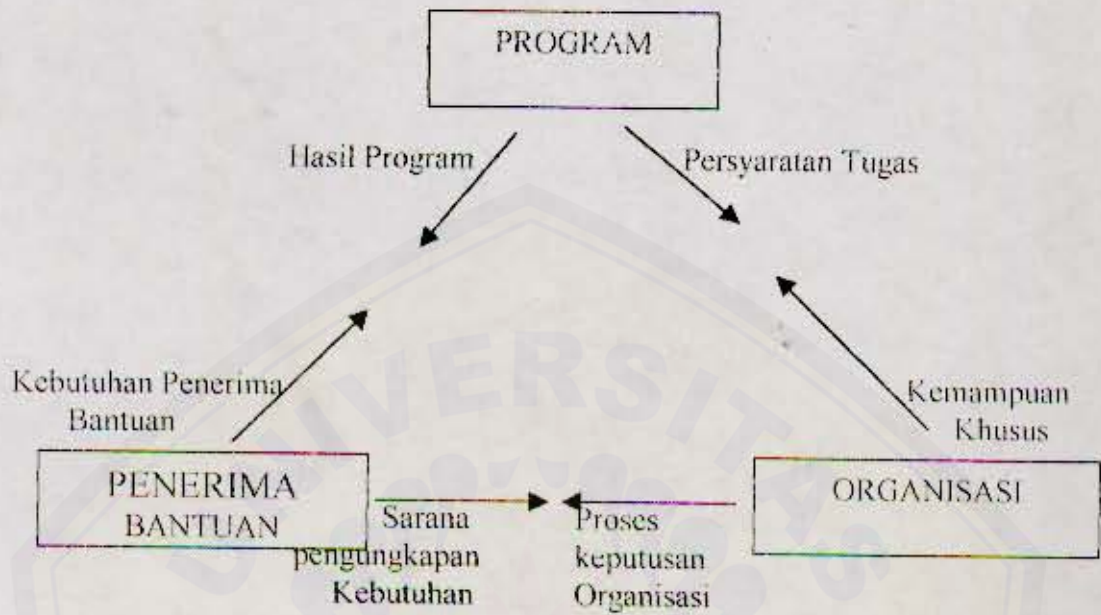
Selanjutnya menurut Graham Burrell Keer mengatakan, bahwa suatu proses kolektif terhadap hal-hal baru (inovasi) yang terjadi dalam suatu masyarakat itu adalah melalui tiga tahap, introduksi, legitimitasi dan implementasi.

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang sebagian besar miskin, dalam pengertian miskin akan sumber-sumbernya, baik tanahnya maupun manusianya. Sedangkan pembangunan membutuhkan kecakapan teknis dan sumber daya. Oleh karena itu bantuan pemerintah utamanya dana sangat penting bagi lapisan mayoritas masyarakat miskin pedesaan.

Menurut Suono Sukirno untuk menciptakan pembangunan diperlukan berbagai jenis sumber-sumber daya. Pertama-tama modal yang berupa dana perlulah untuk disediakan untuk membiayai proyek-proyek swasta maupun pemerintah yang akan digunakan. Selanjutnya harus tersedia pula pengusaha yang cakap, tenaga pimpinan (manajer), tenaga ahli di bidang teknik dan berbagai bidang lainnya, tenaga administrasi pemerintah maupun pekerja-pekerja terlatih yang akan menggunakan dana-dana yang tersedia untuk merealisasi pembiayaan proyek-proyek tersebut, atau dengan kata lain pembangunan hanya akan timbul apabila kedua jenis modal itu, yaitu modal berupa dana dan modal manusia dikoordinasikan untuk menciptakan proyek-proyek yang diciptakan tersebut.

Lebih lanjut menurut David C. Korten (1988) menyatakan bahwa daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program, dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara: kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu.

Pendapat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini



Dengan dikeluarkannya Inpres no. 3 Th. 1996 tentang program pembangunan keluarga sejahtera yang ditugaskan kepada BKKBN, berarti pemerintah memberikan peranan yang lebih besar kepada BKKBN untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera untuk seluruh penduduk Indonesia dan untuk menciptakan cita-cita tersebut, banyak usaha yang dilakukan diantaranya melalui program Takesra Kukesra.

Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan diperlukan adanya program-program, yang menurut David K. Leonard bahwa program tersebut tidak harus sesuatu yang baru, tetapi pada pokoknya program yang dapat memperbaiki ketidakseimbangan tentang pelayanan dan pengembangan taraf hidup mayoritas masyarakat miskin.

BKKBN akan tidak dapat bekerja efektif dalam kondisi yang lemah di pedesaan, tanpa tambahan dana dari sumber-sumber negara apabila ada sesuatu yang penting yang akan dilakukan. Keterlibatan pemerintah sangat penting dalam pembagian dana yang nantinya dapat dipergunakan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu dituntut adanya para pemimpin yang cakap dan mempunyai dedikasi yang tinggi kepada mereka yang miskin di pedesaan yang merupakan target group yang ingin dicapai, yang dampaknya nanti menimbulkan partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disimpulkan, misalnya oleh Norman Uphoff dan Milton Eastman bahwa, salah satu syarat dalam pembangunan adalah sistem organisasi lokal yang kuat yang dapat dihubungkan secara efektif dengan badan-badan tingkat nasional sebagai pendukungnya.

Sesuai dengan pendapat David K Leonard yang menyatakan bahwa untuk menangani program semacam diatas (pembangunan) diperlukan kerja sama antara lembaga-lembaga/ organisasi yang menanganinya, yaitu lembaga pusat dan lembaga pelaksana. Hubungan merupakan mekanisme yang saling terikat dan saling mempengaruhi antar lembaga/organisasi satu sama lain, yang selanjutnya oleh David K. Leonard diberi istilah Linkages yang merupakan hubungan mekanisme yang

keluarga sejahtera yang ditugaskan

peranan yang lebih besar kepada BKK

dan sejahtera untuk seluruh penduduk

tersebut, banyak usaha yang dilakukan diantaranya

Kadukawana.

Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dipertukan adanya program-program, yang menurut David bahwa program tersebut tidak harus sesuatu yang baru, tetapi pada pokoknya yang dapat memperbaiki ketidakseimbangan tentang pelayanan dan taraf hidup mayoritas masyarakat miskin.

BKKBN akan tidak dapat bekerja efektif dalam kondisi yang pedesaan, tanpa tambahan dana dari sumber-sumber negara apabila ada penting yang akan dilakukan. Keterlibatan pemerintah sangat

pembagian dana yang nantinya dapat dipergunakan bagi mereka. Selain itu dituntut adanya para pemimpin yang cakap dan

tinggi kepada mereka yang miskin di pedesaan yang ingin dicapai, yang dampaknya nanti menimbulkan

bersangkutan. Hal ini disimpulkan misalnya oleh bahwa, salah satu cara dalam pedesaan

yang tanpa menimbulkan



masing-masing saling terikat dan pemusatan pada isi program dan jenis/tipe organisasi lokal dan nasional yang nampaknya lebih sesuai bagi program tersebut. Perhatian pokok adalah memberikan keperluan yang lebih sistematis tentang masalah-masalah hubungan. Mekanisme hubungan organisasi atau linkages tadi, perhatiannya ditujukan kepada:

1. Badan/ lembaga yang berhubungan dan berkaitan dengan pembangunan pedesaan
2. Dan jenis program yang akan menguntungkan masyarakat pedesaan.

Selanjutnya masih menurut David K. Leonard dan Dale Marshall digambarkan lima tipe hubungan, yaitu:

1. Keuangan, yaitu pengawasan kredit, fasilitas hubungan di bank, berbagai bentuk pengawasan langsung.
2. Peraturan dan pengawasan, yaitu pemeriksaan buku-buku, pengadministrasian ratio kredit, standart-standart program dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, dsb.
3. Bantuan teknis dan personel, yaitu latihan-latihan peningkatan staf dan tingkat penerimaan, bantuan staf sementara maupun seterusnya, nasihat teknologi pengelolaan dan program, dan sebagainya.
4. Pelayanan, yaitu pengadaan masukan berupa bahan-bahan pelaksanaan tugas-tugas khusus, dan sebagainya.
5. Perwakilan, yaitu bentuk partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program baik formal maupun non formal, kelompok-kelompok konsultasi, dan sebagainya.

Dari lima klasifikasi diatas dalam rangka hubungan antara pusat dan lembaga lokal (BKKBN tingkat kecamatan) sebenarnya menunjukkan adanya dua fungsi pokok yaitu adanya pengawasan dan bantuan. Tujuan hubungan yang berbentuk pengawasan ini ialah memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan aspek pelaksanaan yang lain. Sedangkan tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah

memberikan bantuan yaitu berupa keuangan, pelayanan umumnya bantuan teknik dan personel merupakan fungsi fasilitas.

Agar BKKBN dapat melaksanakan program organisasinya secara efektif, maka hal-hal tersebut diatas yaitu adanya koordinasi pola hubungan serta didukung oleh organisasi yang kuat sangatlah diperlukan. Dalam penelitian efektifitas organisasi adalah perlu diperhatikan tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu

1. Faham mengenai optimalisasi tujuan; memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam tujuan yang saling bertentangan, disamping beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan. Jadi efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai, pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai optimal kelihatannya, lebih realistis untuk tujuan daripada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran.

2. Perspektif sistem; perancangan mengenai optimalisasi tujuan sebenarnya perbaikan dan saling melengkapi dengan ancaman perspektif sistem. Karena tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Dimana tercapainya tujuan jangka pendek dapat memberikan masukan-masukan (faktor) baru demi penentuan tujuan berikutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi bila kita memakai perspektif sistem.

3. Tekanan pada segi tingkah laku manusia dalam sistem organisasi disini dalam rangka mengintegrasikan mikro dan makro dalam analisa dan meneliti bagaimana tingkah laku individu dalam kelompok, akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Melalui ancaman ini berarti mencapai tujuan melalui tingkah laku para anggota organisasi.

Oleh karena BKKBN sebagai suatu lembaga organisasi yang salah satunya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program Takesra Kukesra maka strategi yang efektif untuk mencapai maksud tersebut yakni untuk memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat, diantaranya tergantung kepada

interaksi antar program dan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu dituntut adanya petunjuk pelaksanaan yang efektif yaitu:

1. Organisasi yang menetapkan program itu harus mempunyai kesesuaian secara khusus dengan penyampaian pelayanan kepada anggota-anggota masyarakat.

2. Badan pelaksana harus dapat menemukan sumber-sumber dan ketrampilan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan program tersebut, karena pemakai sumber-sumber itu sendiri orang-orang yang tidak memiliki ketrampilan.

3. Pelaksanaan harus dapat menyesuaikan suatu komponen masalah pembangunan pedesaan dan dituntut agar dapat menyesuaikan dirinya dengan pelayanan-pelayanan yang didapatkan dari pengalaman.

4. Adanya kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota, yaitu adanya:

- a. Mobilitas (pengarahan) sumber-sumber lokal
- b. Badan tersebut memberikan fasilitas pengumpulan informasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan program dengan keadaan setempat.
- c. Keterlibatan masyarakat secara aktif sangatlah diperlukan dalam mengadakan perubahan sosial.
- d. Partisipasi setempat dalam mengadakan bentuk pelayanan masyarakat yang dikehendaki agar pembiayaan tetap berlangsung.

Supaya pelaksanaan program organisasi dapat berjalan secara efektif, maka program itu harus mempunyai kekhususan dan badan pelaksana baik tingkat nasional maupun lokal harus dipilih, dan hubungan antara kedua badan itu harus diciptakan. Pemilihan suatu strategi organisasi untuk penetrapan suatu program tergantung pada corak/bentuk dari program itu dan karakter sosial dari lingkungan tugas dilaksanakannya program tersebut.



### 1.5 Konsepsi Dasar

Pada hakikatnya pada suatu penelitian ilmiah merupakan suatu alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau pegangan secara umum didalam menjelaskan atau menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih.

Seluruh kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penganalisisan. Masalah merupakan kerangka yang utuh dan kronologis, untuk itu diperlukan adanya pandangan teori dari definisi singkat yang berfungsi sebagai landasan terhadap suatu masalah sehingga menjadi inti pada suatu penelitian dan landasan pemikiran yang dimaksud adalah konsepsi dasar atau kerangka teoritis.

Jadi dengan demikian konsepsi dasar dalam suatu penelitian mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhana yang sekaligus memberikan landasan kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok pada suatu penelitian.

Sebelum memberikan batasan konsepsi dasar, penulis terlebih dahulu memberikan batasan atau penelitian atas konsep, menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi pengertian konsep adalah sebagai berikut :

“istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan dan kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial yang bertujuan menyederhanakan pemikiran dengan menggambarkan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkait satu dengan yang lain” (1989:33)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi dasar merupakan kerangka logis dari fakta atau gejala yang tersusun secara singkat dan jelas, yang berfungsi sebagai pedoman, landasan berpikir dalam rangka usaha mencari jawaban atas persoalan penelitian. Adapun manfaat atau kegunaan konsepsi dasar tersebut menurut Koentjaraningrat adalah “membantu peneliti dalam menemukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis” (1992:21). Konsepsi dasar juga merupakan uraian yang menjelaskan

variabel yang telah dinyatakan dalam perumusan masalah berdasarkan teori yang tersusun secara sistematis.

Sedangkan yang dimaksud dengan teori itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Fred H. Kerlinger adalah sebagai berikut :

“ Suatu teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, batasan dan preposisi yang mengajukan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan unsur variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena”. (1990:14)

Dengan mengetahui pengertian konsep dan teori diatas, maka konsep dan teori yang melandasi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep kaitan hubungan kerja BKKBN
2. Konsep efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra
3. Konsep dukungan lembaga pusat

#### 1.5.1 **Konsep Kaitan Hubungan Kerja**

Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Dalam hal ini hubungan kerja dapat bersifat konsultatif dan informatif. Selanjutnya pengertian hubungan kerja menurut Soewarno Handyaningrat adalah:

“Hubungan kerja ialah keseluruhan rangkaian kegiatan antara satuan-satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lainnya yang merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien”. (1989:117)

sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa bentuk komunikasi administrasi dalam mencapai koordinasi yang baik adalah hubungan kerja.

Sebagai satu kesatuan organisasi pemerintah mengenal adanya hubungan kerja antara unit yang satu dengan unit yang lain. Hubungan kerja ini dapat digolongkan menjadi dua jenis hubungan yang pokok, yaitu:

a. Hubungan kerja internal terdiri dari hubungan kerja hirarkhi yang bersifat vertikal, hubungan kerja horisontal dan hubungan kerja diagonal.

1. Hubungan kerja vertikal adalah hubungan antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ketinggian pejabat yang paling bawah. Dalam jenis hubungan kerja vertikal ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan batas wewenang masing-masing.

2. Hubungan kerja yang bersifat horisontal adalah merupakan hubungan kerjasama dua atau lebih unit organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Pada hakikatnya hubungan kerja horisontal ini adalah hubungan kerja yang bersifat fungsional, karena unit organisasi yang satu ada kaitannya dengan fungsi organisasi yang lain.

3. Hubungan kerja yang bersifat diagonal. Hubungan kerja ini bersifat fungsional, karena hubungan kerja ini menyangkut antara unit/ pejabat yang tidak setingkat, dan berada pada unit kewenangan yang berbeda, tetapi mempunyai fungsi yang bersamaan, misalnya hubungan kerja antara Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal suatu departemen dengan Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

b. Hubungan kerja ekstern adalah hubungan kerja antar departemen/ lembaga pemerintahan non departemen, atau disebut interdepartemental.

Hubungan kerja ekstern ini adalah bersifat fungsional, karena merupakan keharusan dalam organisasi pemerintah demi terwujudnya kerjasama yang serasi sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.

Dalam masa pembangunan sekarang ini diperlukan hubungan kerja baik antara departemen maupun antara departemen dengan lembaga pemerintah non departemen yang lain. Hal ini dilakukan mulai dari pembuatan rencana, penyusunan program, pelaksanaan sampai dengan pengawasannya.

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan kerja yang dilakukan BKKBN dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra adalah jenis hubungan kerja ekstern dimana

hubungan kerja tersebut melibatkan departemen dengan lembaga pemerintah non departemen.

Hubungan kerja yang dilakukan BKKBN dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra diwujudkan dalam bentuk kelompok kerja yang disebut kelompok kerja teknis Takesra Kukesra dimana kelompok kerja teknis tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengorganisasian
2. Pelayanan Takesra Kukesra
3. Pembinaan Takesra Kukesra

### 1.5.1.1 Pengorganisasian

Untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Takesra Kukesra disetiap tingkatan wilayah dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten, tingkat kodya/ kabupaten dan tingkat kecamatan dibentuk kelompok kerja teknis Takesra Kukesra (pokjanis Takukesra) yang anggotanya adalah unsur-unsur dari Kantor Negara Kependudukan/ BKKBN, Bank BNI, PT. Pos Indonesia dan yayasan Dana Sejahtera Mandiri, serta unsur lain yang dianggap perlu dan terkait. Pokjanis inimerupakan salah satu kelompok kerja dari pokjanal Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Adapun pengertian pengorganisasian menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:

“Rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan jalan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan membagi tugas diantara para pejabat yang harus melaksanakan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta menyusun jalinan hubungan kerja diantara para pejabatnya”.(1992:34)

Adapun maksud dari pengorganisasian menurut R. Soemita Adikoesuma adalah:

1. Untuk penetapan tugas-tugas yang harus dipenuhi

2. Inventarisasi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi tugas-tugas tersebut diatas
3. Untuk pengelompokan dan kualikasi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut
4. Pemilihan suatu cara pelaksanaan yang rasional termasuk
  - a. Pemilihan orang-orang yang tepat
  - b. Pembagian pekerjaan “kepada Orang” ini dan pada waktu yang sama menetapkan tanggung jawab dan wewenang mereka
  - c. Menyuruh “orang ini” bekerja sama
  - d. Pemilihan alat-alat pembantu teknis yang tepat, termasuk pemilihan prosedur “pelaksanaan teknis” secara efisien

#### 1.5.1.2 Pelayanan Takesra Kukesra

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah atau kesukaran yang dihadapi sehingga memerlukan pelayanan yang menuuaskan. Pelayanan Takesra Kukesra diberikan melalui Kantor Pos Pelaksana (KPP dan KPTB). Setiap penabung dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan Ekonomi) yang telah memiliki Takesra akan memperoleh bantuan Kukesra untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.

#### 1.5.1.3 Pembinaan Takesra Kukesra

Kegiatan pembinaan dimaksudkan agar pelayanan Takesra Kukesra dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan dampak kepada pengembangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Adapun pembinaan menurut Hadari Nawawi adalah sebagai berikut:

“ Usaha menolong orang lain untuk mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri dan orang lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu menganalisa masalah-masalah “atau kesukaran” yang dihadapinya dengan menetapkan sendiri keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah atau kesukaran yang dihadapinya itu”.

Pada pelaksanaan program Takesra Kukesra pembinaan ditujukan kepada:

1. Penabung atau penerima Takesra Kukesra

Kegiatan pembinaan tersebut meliputi antara lain:

- a. Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian hakekat dan kebersamaan tanggung renteng dalam Kukesra dan bahwa ketidakdisiplinan salah satu nasabah akan merugikan kelompok lain
- b. Bimbingan usaha terutama untuk yang mengalami kesulitan dalam pemanfaatan kredit
- c. Peningkatan kualitas produk (dalam usaha ekonomi produktif) dengan mempertimbangkan pangsa pasar

2. Pembinaan kepada petugas yang terlibat dalam pelayanan Takesra Kukesra

Pembinaan terhadap petugas ini dimaksudkan adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat, wawasan, pengetahuan keterampilan para petugas agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dengan sasarannya adalah semua petugas BKKBN, Bank BNI, PT. Pos Indonesia dan instansi/ lembaga yang terkait, terutama yang berhubungan dengan pelayanan Takesra Kukesra. Pembinaan dilakukan baik secara kelompok dan berkala dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan yang ada maupun perorangan melalui kunjungan dilapangan atau melalui bimbingan terpadu dalam satu tim. Materi pembinaan tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang berkembang dan tantangan yang dihadapi oleh petugas setempat. Dasar pembinaan tersebut adalah hasil dari pengamatan dan umpan balik hasil pelaksanaan (kinerja) para petugas.

3. Pembinaan kepada kelompok usaha

Kegiatan pembinaan bertujuan agar kelompok usaha/ UPPKS tetap berjalan dengan dinamis dan berkembang serta menjadi semakin efektif sebagai wadah pembinaan kewirausahaan, kemitrausahaan dan sarana pelayanan Takesra Kukesra. Pembinaan ini dilakukan oleh jajaran BKKBN, Bank BNI, PT. Pos Indonesia dan

instansi/ lembaga pembangunan maupun swasta yang terkait melalui pokjanal dan pokjanis.

## 1.5.2 Konsep Efektifitas Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program-program yang ditetapkan maka perlu adanya pencapaian efektifitas pelaksanaan program tersebut. Maksudnya setiap tujuan program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan tercapai dengan efektif. Tanpa adanya efektifitas pelaksanaan program-programnya, tujuan organisasi berarti belum tercapai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Indrajaya (1989:225) bahwa "Untuk menilai apakah organisasi efektif atau tidak secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya". Dalam hal ini berarti program-program tersebut harus berorientasi pada tujuan organisasi berupa peningkatan kesejahteraan kelompok Takesra Kukesra yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, maka organisasi dikatakan efektif jika mampu merealisasikan tujuan organisasinya. Dan terealisasinya tujuan program tidak terlepas dari peran lembaga lokal dan lembaga pusat.

Sedangkan yang dimaksud dengan efektifitas menurut sebagaimana yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1988:810) bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya berarti efektif.

Jadi jelas bahwa efektifitas yang dimaksud disini merupakan kesesuaian antara perencanaan satu program kerja organisasi dengan hasil yang telah dicapai yang sebelumnya telah direncanakan tersebut. Apabila tingkatan kesesuaian yang dapat dicapai tersebut maksimal berarti efektif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pariatra Wastra (1982:81) mengenai efektifitas pelaksanaan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat

menimbulkan suatu akibat terwujudnya sesuai dengan ketentuan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan efektifitas pelaksanaan program menurut David K. Leonard (1985:47) adalah tingkatan pencapaian yang layak dicapai sesuai dengan yang dikehendaki oleh tujuan program.

Selanjutnya dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik indikator dari efektifitas adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang menetapkan program ini harus mempunyai kesesuaian secara khusus dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/masyarakat
2. Badan pelaksana harus menemukan sumber-sumber keterampilan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan program tersebut, karena pemakai sumber-sumber itu sendiri tidak memiliki keterampilan
3. Pelaksana harus dapat menyesuaikan satu komponen masalah dalam pembangunan dan dituntut agar dapat menyesuaikan dirinya dengan pelayanan-pelayanan yang didapatkan dari pengalaman
4. Adanya kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota yaitu adanya:
  - a. Mobilitas (pengarahan) sumber-sumber lokal
  - b. Badan tersebut memberikan fasilitas pengumpulan informasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan program dengan keadaan setempat
  - c. Keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan dalam mengadakan perubahan sosial
  - d. Partisipasi setempat dalam mengadakan bentuk pelayanan masyarakat yang dikehendaki agar pembiayaan tetap berlangsung.

Supaya pelaksanaan program organisasi dapat berjalan efektif, maka program tersebut harus mempunyai kekhususan dan badan pelaksana baik tingkat lokal



maupun tingkat nasional harus dipilih, dan hubungan antara kedua badan itu harus diciptakan.

Mengacu pada konsep yang telah dikemukakan diatas maka penulis menjadikan konsep tersebut sebagai dasar dalam mengukur variabel efektifitas pelaksanaan program dengan indikator sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/ masyarakat
2. Kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota

#### **1.5.2.1 Kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/ masyarakat**

Sehubungan dengan topik penelitian yang penulis lakukan maka untuk menentukan suatu keberhasilan ataupun efektifitas pelaksanaan Takesra Kukesra dikecamatan Semboro, kabupaten Jember maka yang penulis pakai sebagai acuan adalah kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program tersebut yaitu BKKBN dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/ masyarakat artinya sejauh mana pelaksanaan pelayanan program tersebut dapat terlaksana secara efektif.

#### **1.5.2.2 Kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota**

Dalam upaya mencapai keluarga bahagia sejahtera, partisipasi pelaksanaan program dalam menarik minat peserta program sangat penting. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan peserta program yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sarwani Sacheh (19870:65) yang menyatakan istilah partisipasi pada hakekatnya berarti ikut sertanya suatu kelompok orang dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu susunan yang lebih besar.

### 1.5. 3 Konsep dukungan Lembaga Pusat

Dalam pelaksanaan pembangunan yang harus digerakkan dan diperlancar, dalam arti bahwa satu bidang atau program pemerintah selalu berkaitan dengan bidang atau program yang lain, maka dalam hal ini perlu adanya dukungan untuk melancarkan pelaksanaan program tersebut.

Bantuan dari pusat yang umumnya berupa sumber dana sangatlah diperlukan guna pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan Bank BNI memegang peranan penting dalam usaha melaksanakan program Takesra Kukesra yang menyangkut tentang perkreditan.

Dukungan pusat biasanya merupakan usaha atau program formil, dalam bentuk gerakan serta pendidikan kelembagaan, kesejahteraan anggota, organisasi, yang dilaksanakan dengan menggunakan konsepsi dari teknik-teknik tertentu program-program yang bersifat akselerasi, yang bertujuan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang pada dasarnya dukungan pusat ini menentukan adanya pengorganisasian dan kerjasama antar unsur formil dengan lembaga lokal yang dapat dimengerti dalam berbagai cara. Yang oleh David K. Leonard dan Dale R. Marshall digambarkan lima tipe hubungan, yaitu:

- a. Keuangan, yaitu pengawasan kredit, fasilitas hubungan di bank, berbagai bentuk bantuan langsung pengalihan (transfer bahan-bahan).
- b. Peraturan dan pengawasan, yaitu pemeriksaan buku-buku, pengadministrasian harga-harga pasar, ratio kredit organisasi, standar-standar program dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan sebagainya.
- c. Bantuan teknik dan personil, yaitu latihan- latihan untuk peningkatan staf dan tingkat penerimaan, bantuan staf sementara maupun seterusnya, nasehat teknik pengelolaan dan program, dan sebagainya.
- d. Pelayanan, yaitu pengadaan masukan berupa bahan-bahan pelaksanaan tugas-tugas khusus dan sebagainya.

e. Perwakilan, yaitu sebagai bentuk partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program baik formal maupun non formal, kelompok-kelompok konsultasi masyarakat, dan sebagainya.

Dukungan pusat dapat menggunakan setiap mekanisme ini baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan dalam usaha mempengaruhi lembaga lokal. Dari lima klasifikasi diatas dalam rangka hubungan antara pusat dan lembaga lokal sebenarnya menunjukkan dua fungsi pokok yaitu adanya fungsi pengawasan dan adanya bantuan. Tujuan hubungan yang berbentuk pengawasan ini ialah memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan aspek pelaksanaan yang lain. Berbagai cara pengawasan dapat dilakukan oleh pusat, yaitu berupa semua peraturan dan sarana moneter, bentuk semua ini merupakan hubungan pengawasan. Bantuan teknik dan personel utamanya bantuan staf dapat juga digunakan untuk mempengaruhi organisasi lokal, tetapi sebaliknya organisasi lokal dapat mengawasi pusat dengan mengadakan perwakilan. Tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah memberikan bantuan yaitu berupa keuangan, pelayanan dan umumnya bantuan teknik dan personel merupakan fungsi fasilitas. Bantuan ini timbul, biasanya organisasi lokal mempunyai kepentingan tertentu untuk menetapkan suatu program tetapi masih kurang di bidang lainnya. Tetapi pada umumnya setiap bantuan selalu diikuti dengan pengawasan, biasanya ditentukan dengan peraturan. Jadi sebenarnya bentuk pengawasan serta bentuk bantuan yang diberikan oleh badan-badan pelaksana tingkat nasional untuk lancarnya pelaksanaan program, menentukan efektifitas pelaksanaan program itu sendiri. Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dukungan yang diberikan lembaga pusat adalah :

- a. Bantuan
- b. Pengawasan

### **1.5.3.1 Bantuan**

Tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah memberikan bantuan yaitu berupa bantuan keuangan, pelayanan dan umumnya bantuan teknik dan personel merupakan fungsi fasilitas. Bantuan ini timbul, biasanya organisasi lokal mempunyai kepentingan tertentu untuk menerapkan suatu program tapi masih kurang di bidang lainnya.

### **1.5.3.2 Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Hakikat pengawasan disini adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan dari program.

### **1.5.4 Teori yang menghubungkan konsep kaitan hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat dengan efektifitas pelaksanaan program**

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Selanjutnya Sudono Sukirno menyatakan bahwa untuk menciptakan pembangunan diperlukan berbagai jenis sumber daya. Pertama-tama modal yang berupa dana perlulah disediakan untuk membiayai proyek swasta maupun pembangunan yang digunakan. Selanjutnya tersedia pula pengusaha-pengusaha yang cakap, tenaga pimpinan perusahaan (manajer), tenaga ahli dibidang teknologi dan berbagai bidang lainnya, tenaga administrasi perusahaan maupun pekerja-pekerja yang terlatih yang akan menggunakan dana-dana yang tersedia untuk merealisasi

pembinaan proyek-proyek tersebut dengan kata lain pembangunan hanya akan timbul apabila kedua jenis modal itu yaitu modal berupa dana dan modal manusia dikoordinasikan untuk menciptakan proyek-proyek yang diciptakan.

Lebih lanjut menurut David K. Leonard yang dikutip oleh Drs. R.K Widjadi, SU dalam laporannya menyatakan bahwa untuk menangani program semacam diatas (pembangunan)diperlukan kerjasama antara lembaga/ organisasi yang menanganinya, yaitu lembaga pusat dan lembaga pelaksana. Hubungan ini merupakan mekanisme yang saling terikat dan saling mempengaruhi antara lembaga/ organisasi/ badan satu sama lain, yang selanjutnya oleh David K. Leonard diberi istilah linkages. Pola hubungan (linkages)adalah hubungan mekanisme yang masing-masing saling terikat dan saling mempengaruhi satu sama lain antara pemusatan pada isi program dan jenis/ tipe organisasi lokal dan nasional yang tampaknya lebih sesuai bagi program tersebut. Perhatian pokoknya adalah memberikan keperluan yang lebih sistematis tentang masalah-masalah hubungan.

Mekanisme hubungan organisasi atau linkages tadi, perhatiannya ditujukan kepada:

1. Badan/ lembaga yang berhubungan dan berkaitan dengan pembangunan pedesaan
2. Dan jenis program yang akan menguntungkan masyarakat pedesaan

Jadi dalam rangka pelaksanaan program menyangkut hubungan (linkages) yang meliputi pada pemusatan isi program yang akan dilaksanakan, serta lembaga/ organisasi setempat, dan hubungan bagian pusat (instansi lain yang terkait) yang nampaknya lebih sesuai dengan program tersebut. Sehingga dalam membahas organisasi ini yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan baik oleh lembaga pusat maupun lembaga lokal untuk mendorong BKKBN agar dapat memberikan pelayanan kepada rakyat miskin. Jadi bukannya hasil apakah yang diinginkan, melainkan tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang bersangkutan.

Oleh karena itu supaya BKKBN dapat melaksanakan program organisasinya secara efektif maka hal-hal tersebut diatas yaitu adanya koordinasi, pola hubungan serta didukung oleh organisasi yang kuat sangatlah diperlukan.

### 1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan harapan bagi penulis tentang hubungan dua variabel, dimana akan memberikan suatu kepastian terhadap dasar pemikiran yang telah dituangkan dalam hubungan tersebut.

Menurut J. Supranto pengertian hipotesis adalah "Hipotesis adalah suatu proporsisi, kondisi atau yang untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan agar dapat ditarik konsekuensi yang logis dengan cara ini kemudian diadakan pengujian (testing) tentang kebenarannya dengan mempergunakan data hasil penelitian". (1986:25)

Dengan melihat pada cara seseorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesisnya, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah hipotesis yang menyatakan adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih atau menyatakan adanya perbedaan pada hal-hal tertentu pada kelompok yang berbeda. Pada umumnya kemampuan uji statistik berupa penerimaan hipotesis alternatif sebagai hal yang benar. Untuk memilih mana diantara macam hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian menurut buku metode penelitian hal 38, yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Tinggi menyatakan sebagai berikut:

"Sering timbul pertanyaan mengenai mana diantara kedua macam hipotesis itu, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang harus dirumuskan sebagai

hipotesis penelitian. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat tergantung kepada landasan teoritis yang dipergunakan. Jika landasan teoritis itu mengarahkan pada penyimpulan "tidak ada hubungan" atau ke "tidak ada perbedaan" maka hipotesis penelitian yang dirumuskan akan merupakan hipotesis nol. Sebaliknya jika tinjauan teoritis mengarahkan penyimpulan ke "ada hubungan" atau ke "ada perbedaan" maka hipotesis penelitian yang akan dirumuskan merupakan hipotesis alternatif".

Berdasarkan uraian diatas jelas jika teori menunjukkan pada penyimpulan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan maka hipotesis penelitian dirumuskan merupakan hipotesis nol sebaliknya jika tinjauan teori mengarahkan kepada penyimpulan ke ada hubungan atau ke ada perbedaan maka hipotesis penelitian merupakan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dalam hal ini tidak mencari hubungan melainkan melihat bagaimana hubungan tersebut yang telah dirumuskan dalam teori.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif hal ini didasarkan atas teori yang disampaikan oleh David K. Leonard " Jadi dalam rangka pelaksanaan program menyangkut hubungan (linkages) yang meliputi pada pemusatan isi program yang akan dilaksanakan, serta lembaga/ organisasi setempat, dan hubungan bagian pusat (instansi lain yang terkait) yang nampaknya lebih sesuai dengan program tersebut".

Dengan demikian teori diatas menjelaskan diperlukan adanya hubungan antara kaitan hubungan kerja antara organisasi setempat, dan hubungan bagian pusat dalam pelaksanaan suatu program. Sehingga hipotesa dalam penelitian ini adalah "Semakin baik hubungan kerja antara BKKBN dan lembaga pusat dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra maka semakin efektif pula program Takesra Kukesra tersebut".

## 1.7 Definisi Operasional

Dalam suatu penelitian untuk menjadikan variabel – variabel yang kita teliti semakin jelas maka perlu adanya batasan – batasan agar dapat diperoleh indikator – indikator yang nyata dari variabel penelitian. Oleh karena itu diperlukan adanya definisi operasional.

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan suatu variabel kedalam suatu bentuk yang empiris dan dapat diuji kebenarannya oleh peneliti lain. Dalam hal ini Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi memberikan pengertian tentang definisi operasional sebagai berikut :

“Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu diukur dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian seorang peneliti akan mengetahui pengukuran variabel, sehingga dapat mengetahui baik buruknya suatu pengukuran tersebut” (1989 : 23 ).

Sedangkan Koentjoroningrat mengemukakan pengertian tentang definisi operasional sebagai berikut :

“ Definisi operasional tidak lain adalah mengubah konsep – konsep yang berupa konstruk- konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati atau diuji serta dapat ditentukan kebenarannya oleh peneliti” (1981 : 23 ).

Berdasarkan pendapat diatas, maka untuk memberikan batasan-batasan terhadap variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam hipotesis, serta agar dapat dihubungkan dengan empirik, maka masing- masing variabel dari penelitian ini akan dapat dioperasionalkan sebagai berikut.

### 1.7.1 Operasionalisasi Variabel (X) kaitan hubungan kerja

Hubungan kerja yang dilakukan oleh BKKBN adalah pelaksanaan program Fakesra Kukesra adalah jenis hubungan kerja ekstern dimana hubungan kerja tersebut melibatkan departemen dengan lembaga non departemen.



Hubungan kerja yang dilakukan BKKBN dalam pelaksanaan program Takesra Kukesra diwujudkan dalam bentuk kelompok kerja yang disebut kelompok kerja teknis Takesra Kukesra dimana kelompok kerja teknis tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengorganisasian (X1)
- b. Pelayanan Takesra Kukesra (X2)
- c. Pembinaan Takesra Kukesra (X3)

Selanjutnya dari variabel (X) yaitu kaitan hubungan kerja BKKBN indikator yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

#### 1.7.1.1 Pengorganisasian (X1)

Adapun pengorganisasian menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:

“Rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan jalan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas-tugas diantara para pejabat yang harus melaksanakan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta menyusun jalinan hubungan kerja diantara para pejabatnya”

Adapun maksud dari pengorganisasian tersebut adalah:

- a. Untuk menetapkan tugas-tugas yang harus dipenuhi
- b. Inventarisasi dari pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi tugas-tugas tersebut diatas
- c. Untuk pengelompokan dan kualifikasi dari pekerjaan tersebut
- d. Untuk pemilihan suatu cara pelaksanaan yang rasional harus
  1. Pemilihan orang yang tepat
  2. Pembagian pekerjaan “kepada orang” ini dan pada waktu yang sama menetapkan tanggung jawab dan wewenang mereka
  3. Menyuruh “orang ini” bekerjasama
  4. Pemilihan alat-alat pembantu teknis yang tepat, termasuk pemilihan prosedur “pelaksanaan dan teknologi” efisien

Sehingga dapat ditarik item-item:

1. Pemilihan orang-orang yang tepat
2. Pembagian pekerjaan "kepada orang" ini dan pada waktu yang sama menetapkan tanggung jawab dan wewenang mereka
3. Menyuruh "orang ini" bekerjasama
4. Pemilihan alat-alat pembantu teknis yang tepat, termasuk pemilihan prosedur "pelaksanaan dan teknologi" efisien.

#### 1.7.1.2 Pelayanan Takesra dan Kukesra (X2)

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah atau kesukaran yang dihadapi. Sehingga indikator pelayanan Takesra dan Kukesra dapat ditarik item-item sebagai berikut:

1. Pelayanan mengenai pengadaan, pembukuan, penyeteroran, dan pengambilan Takesra Kukesra
2. Pelayanan pemanfaatan dana Kukesra untuk pengembang ekonomi produktif.

#### 1.7.1.3 Pembinaan Takesra dan Kukesra (X3)

Adapun pembinaan menurut Hadari Nawawi adalah sebagai berikut:

"Usaha menolong orang lain untuk mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu menganalisa masalah atau kesukaran yang dihadapinya dengan menetapkan sendiri keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah atau kesukaran yang dihadapinya itu". (1993:23)

Sehingga indikator pembinaan Takesra Kukesra dapat ditarik item-item sebagai berikut:

1. Pembinaan yang ditujukan kepada penabung/ penerima Takesra Kukesra
2. Pembinaan kepada petugas yang terlibat dalam pelayanan Takesra Kukesra
3. Pembinaan kepada pengurus kelompok usaha (UPPKS).

### **1.7.2 Operasionalisasi Variabel (Y) Efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra**

Yang menjadi variabel efektifitas dalam penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra dikecamatan Semboro kabupaten Jember. Indikator dari efektifitas pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu dengan penyampaian pelayanan kepada anggota
2. Kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota

#### **1.7.2.1 Kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program dengan penyampaian pelayanan kepada anggota (Y1)**

Supaya pelaksanaan program organisasi dapat berjalan efektif, maka program itu harus mempunyai kekhususan dan badan pelaksana baik tingkat nasional maupun tingkat lokal harus dipilih, dan hubungan antara kedua badan itu harus diciptakan. Pemilihan suatu strategi organisasi untuk pengetrapan suatu program tergantung pada corak atau bentuk dari program itu dan karakter sosial dari lingkungan tugas dilaksanakannya program tersebut.

Dengan demikian dapat ditarik item-item sebagai berikut:

1. Kekhususan Program Takesra Kukesra menyangkut sasaran yaitu keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
2. Penciptaan hubungan kerjasama antara BKKBN dengan instansi lain
3. Pelayanan kepada penerima atau penabung Takesra Kukesra

#### **1.7.2.2 Kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota (Y2)**

Dalam upaya untuk mencapai keluarga bahagia sejahtera, partisipasi pelaksanaan program dalam menarik minat peserta program sangat penting. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sarwani Sacheh (1987:65) yang menyatakan istilah partisipasi

pada hakekatnya berarti ikut sertanya suatu kelompok orang dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu susunan yang lebih besar. Sehingga dapat ditarik item-item:

1. Mobilitas sumber-sumber lokal yaitu peranan anggota
2. Pengumpulan informasi (kegiatan rapat)
3. Peningkatan kehidupan anggota
4. Ketersediaan pengadaan pembiayaan untuk kelangsungan program.

### **1.7.3 Operasionalisasi Variabel (Z) Dukungan Lembaga Pusat**

Dalam usaha menunjang efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra diperlukan suatu keterlibatan lembaga pusat yang hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk dukungan yang diberikan. Dukungan dari lembaga pusat ini dapat dilihat dari yang tersebut dibawah ini:

1. Bantuan (Z1)
2. Pengawasan (Z2)

#### **1.7.3.1 Bantuan (Z1)**

Tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah memberikan bantuan yaitu berupa bantuan keuangan, pelayanan dan umumnya bantuan teknik dan personel merupakan fungsi fasilitas. Bantuan ini timbul, biasanya organisasi lokal mempunyai kepentingan tertentu untuk menerapkan suatu program tetapi masih kurang dibidang lainnya. Sehingga indikator bantuan dapat ditarik item-item sebagai berikut:

1. Keuangan
2. bantuan teknis/ personel
3. Pelayanan
4. Perwakilan

### 1.7.3.2 Pengawasan (Z2)

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Halikat pengawasan disini adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan dari program. Sehingga dari uraian diatas fungsi pengawasan dapat diturunkan menjadi item-item:

1. Macam peraturan yang diberikan
2. Pengawasan keuangan
3. Pemeriksaan buku-buku/ administrasi

Setelah penulis membuat definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian, maka langkah selanjutnya menentukan skor dan standart terhadap item-item atau pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dari setiap pertanyaan dalam kuisisioner yang penulis ajukan terhadap responden, terhadap dua alternatif jawaban yaitu :

1. Jika responden menjawab selalu, maka akan mendapat skor 3
2. Jika responden menjawab kadang-kadang maka mendapat skor 2
3. Jika responden menjawab tidak pernah, maka mendapat skor 1

Selanjutnya untuk menentukan kriteria penelitian dari masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

1. Variabel kaitan hubungan kerja BKKBN

Untuk variabel kaitan hubungan kerja BKKBN diperoleh 9 item, sehingga nilai terendah adalah 9, dan nilai tertinggi adalah 27. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel peran hubungan kerja BKKBN dan dapat dikriteriakan sebagai berikut:

1. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 9-14, maka kriterianya adalah rendah

2. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 15-20, maka kriterianya adalah sedang
3. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 21-27, maka kriterianya adalah tinggi

## 2. Variabel efektifitas pelaksanaan program

Untuk variabel efektifitas pelaksanaan program jumlah keseluruhan item adalah 7, sehingga skor terendah adalah 7 dan skor tertinggi adalah 21, dengan demikian variabel efektifitas pelaksanaan program dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 7-11, maka kriterianya adalah rendah
2. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 12-16, maka kriterianya adalah sedang
3. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 17-21, maka kriterianya adalah tinggi.

## 3. Variabel Dukungan Lembaga Pusat

Untuk variabel dukungan lembaga pusat jumlah keseluruhan item adalah 7, sehingga skor terendah adalah 7 dan skor tertinggi adalah 21, dengan demikian variabel dukungan lembaga pusat dapat dikriteriakan sebagai berikut:

1. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 7-11, maka kriterianya adalah rendah
2. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 12-16, maka kriterianya adalah sedang
3. Apabila nilai jawaban responden berkisar antara 17-21, maka kriterianya adalah tinggi.



### 1.8 Metode Penelitian

Mengingat pentingnya data dalam suatu penelitian ilmiah maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode sebelum membahas metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Winarno Surachmad pengertian metode sebagai berikut

“Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya akan menguji serangkaian hipotesa menggunakan alat-alat tertentu” (1985 :131 )

Sedangkan Sutrisno Hadi mengungkapkan pendapatnya sehubungan dengan metodologi research sebagai berikut :

“Metode research sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras, maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya” (1984:11 ).

Jadi jelas bahwa penelitian adalah merupakan penelaahan yang dilakukan melalui penyelidikan yang nyata dan sempurna daripada seluruh masalah yang dapat ditentukan sehingga kita dapat memecahkannya.

Metode sangat berguna untuk mengumpulkan data-data didalam proses penelitian ilmiah dengan menggunakan kata lain adalah menggunakan metode dalam suatu penelitian selain sebagai jalan untuk mencapai tujuan juga digunakan sebagai pencari data. Dalam hal ini langkah- langkah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik penentuan populasi
2. Teknik penentuan sampel
3. Teknik pengumpulan data
4. Teknik analisa data

Agar semakin jelas masing- masing metode tersebut akan penulis jabarkan satu persatu.

### 1.8.1 Teknik Penentuan Populasi

Sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu menetapkan daerah atau lokasi yang menjadi tempat penelitian. Keseluruhan unsur yang ada di tempat penelitian itu disebut populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi yang menyatakan bahwa “ populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga” (1989:108).

Berkaitan dengan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan sasaran yang menjadi objek penelitian yang dapat berupa manusia, barang, organisasi atau benda lain yang hendak diteliti. Dan metode penentuan populasi menurut Mannase Malo dibagi dua yaitu populasi sasaran atau populasi survai sebagai berikut” Populasi target merupakan populasi yang telah kita tentukan sesuai permasalahan penelitian sedangkan populasi survai merupakan populasi yang terliput dalam penelitian penelitian yang dilakukan” (1997:150)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa populasi survai lebih kecil dari populasi sasaran sehingga dalam penelitian ini populasinya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Populasi sasaran atau populasi target

Populasi sasaran atau populasi target dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat di kecamatan Semboro yang menjadi penerima/ penabung Takesra Kukesra.

b. Populasi survai

Populasi survai dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang menjadi penabung/ penerima Takesra Kukesra yaitu melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).



### 1.8.2 Teknik Penentuan Sampel

Dalam suatu penelitian disamping harus menentukan populasi itu juga harus menentukan sampel oleh karena tidak semua obyek sasaran dalam penelitian diperlukan untuk diteliti. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar penelitian yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Sebagaimana yang diungkapkan Winarno Surachman berikut “ Karena tidak mungkin menyelidiki secara langsung mendidik segenap populasi padahal tujuan penelitian adalah untuk menemukan generalisasi yang berlangsung secara umum, karena seringkali penyelidikan terpaksa menggunakan sebagian saja populasi yaitu sejumlah sampel yang dipandang representatif terhadap penelitian kita”. (1985:93)

Selanjutnya Sutrisno Hadi menjelaskan tentang berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi, ketidaktetapan ini tidak perlu membuat keraguan pada penulis” (1983:73)

Dari pendapat diatas diketahui bahwa dalam penentuan sampel tidak ada ketentuan mutlak tentang jumlah sampel. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ida Bagus Mantra dan Kastro yang menyimpulkan berbagai pendapat dari berbagai peneliti, yaitu: “Beberapa peneliti mengatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10% dan ada pula yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimum 5% dari jumlah satuan “elementer dari populasi” (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1987:106). Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel seperti yang disebutkan dalam populasi survai yaitu anggota masyarakat yang menjadi penabung/ penerima Takesra Kukesra di kecamatan Semboro yaitu melalui kelompok-kelompok UPPKS dimana terdapat 60 kelompok yang tersebar dikecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan anggota antara 15-25 orang tiap kelompok dengan tingkat homogen yang tinggi.. Dan untuk respondennya ketua kelompok dengan asumsi ketua kelompoklah yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kelompok UPPKS

## 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber-sumber sebagai berikut :

1. Sumber primer, yaitu sumber yang dapat memberikan secara langsung data yang diperlukan atau data itu diperoleh dari sumber I yaitu responden.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber – sumber masukan yang diperoleh dengan mengutip sumber-sumber lain, misalnya catatan grafik, dokumen atau literatur.

Selanjutnya metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah:

1. Teknik observasi
2. Teknik Dokumentasi
3. Teknik Interview
4. Teknik Kuisisioner.

### 1.8.3.1 Teknik Observasi

Teknik Observasi sangat penting, karena dengan observasi inilah peneliti akan dapat mengetahui secara langsung gejala- gejala yang akan diteliti. Pengertian observasi menurut Sutrisno Hadi adalah:

“Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis kejadian-kejadian atau fenomena yang diselidiki” (1984:26).

Teknik observasi merupakan langkah awal untuk memeriksa secara dekat sekaligus mengadakan pencatatan terhadap gejala- gejala secara sistematis yang ditemukan di lapangan.

### 1.8.3.2 Teknik Dokumentasi

Kegunaan teknik ini seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo adalah sebagai berikut:

“Dokumentasi sangat berguna untuk membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari. Dengan

memberikan pengertian menyusun yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisa yang lebih subur, pendeknya membuka kesempatan untuk mempertajam pengalaman ilmiah" (1991:87)

### 1.8.3.3 Teknik Interview

Pengertian interview adalah wawancara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Koentjoroningrat yaitu:

"Methode wawancara atau interview adalah mencakup cara- cara yang dipergunakan seseorang dalam suatu tugas tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap atau bertatap muka dengan orang lain"(1981:81).

### 1.8.3.4 Teknik Kuisisioner

Koentjoroningrat memberikan keterangan tentang teknik kuisisioner ini adalah:

"Kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisikan tentang suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang. Dengan demikian kuisisioner dapat dimaksudkan sebagai daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban- jawaban dari responden" (1981:73).

### 1.8.4 Teknik Analisa Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya penganalisaan yang berguna dalam menganalisa masalah penelitian. Ada dua jenis analisa data yaitu analisa data kuantitatif dan kualitatif. Mengenai maksud dari kedua jenis analisa data tersebut Sutrisno Hadi mengatakan bahwa :

"jenis data yang dapat diukur secara langsung atau lebih tepatnya dapat dihitung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang diukur secara tidak langsung termasuk jenis data kualitatif".(1989:66)

Dengan demikian penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kuantitatif yaitu mengumpulkan data-data yang nantinya dinyatakan dengan angka dengan melalui alat ukur. Setelah data terkumpul, dianalisa dengan statistik non parametrik yang menggunakan korelasi ranking parsial Kendall. Penggunaan analisa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika terlihat ada korelasi antara dua

variabel, selalu terdapat kemungkinan bahwa korelasi ini adalah akibat dari asosiasi antara masing-masing kedua variabel itu dengan suatu variabel ketiga.

Secara statistik, masalah ini dapat diatasi dengan metode korelasi parsial. Dalam korelasi parsial, akibat-akibat variasi yang disebabkan oleh suatu variabel ketiga terhadap hubungan antar variabel X dan Y dihilangkan. Dengan perkataan lain, korelasi antara X dan Y ditemukan variabel ketiga, Z dijaga agar konstan.

Dengan demikian pertimbangan digunakan teknik analisa ranking parsial Kendall sudah tepat.

Sehingga dapat digunakan rumus

$$\delta = \frac{AD - BC}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

(Sidney Siegel 1997:279)

dengan keterangan:

$\delta_{xy.z}$  = Koefisien korelasi rank partial Kendall

A,B,C,D = mewakili korelasi

Meskipun metode yang diberikan untuk menghitung  $\delta_{xy.z}$  berguna dalam mengungkapkan sifat hakikat korelasi parsial, jika N menjadi besar mengungkapkan sifat hakikat korelasi parsial, jika N menjadi besar metode ini cepat menjadi merepotkan karena meningkatnya dengan cepat harga  $[N]^2$ . Kendall telah menunjukkan bahwa:

$$\delta_{xy.z} = \frac{\delta_{xy} - \delta_{yz}\delta_{xz}}{\sqrt{(1 - \delta_{xy}^2)(1 - \delta_{xz}^2)}}$$

(Sidney Siegel 1997:280)

Dipandang dari segi penghitungannya, rumus kedua diatas lebih mudah daripada rumus pertama. Untuk mempergunakannya, kita pertama-tama harus

menentukan korelasi  $\delta$  antara X dan Y, X dan Z, dan Y dan Z. Dengan ditemukannya harga itu, kita dapat menggunakan rumus kedua untuk menghitung  $\delta_{x,z}$



## BAB II

### DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

#### 2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian adalah suatu deskripsi atau gambaran tentang lokasi daerah yang merupakan sasaran penelitian. Daerah penelitian ini yang dimaksud adalah gambaran umum dari kecamatan Semboro kabupaten Jember. Lokasi atau daerah penelitian ini sebagai sasaran dari objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis yang secara rasional kiranya mudah terjangkau dalam penelitian ini terbatas untuk skripsi ini.

Berdasarkan deskripsi daerah penelitian ini, maka akan diketahui secara umum tentang daerah atau lokasi penelitian melalui deskripsi daerah penelitian yaitu dengan mengetahui gambaran umum daerah atau lokasi penelitian yaitu dengan mengetahui gambaran umum denah atau lokasi penelitian ini akan diperoleh suatu informasi data dalam bentuk sekunder. Dimana data sekunder ini secara tidak langsung akan menunjang dan akan menjadi landasan pijak terhadap data primer dalam analisa data lebih lanjut.

Untuk mempersingkat dan memperjelas maksud dari bab ini, seterusnya dapat diikuti dalam uraian dan penyajian dalam masing-masing subbab berikut ini.

#### 2.2 Keadaan Geografis

Kecamatan Semboro merupakan bagian dari Kabupaten Jember dengan tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan dari permukaan laut yaitu 130 meter, dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak yaitu 142 hari. Kecamatan Semboro mempunyai batas- batas yaitu:

Barat : Kecamatan Sumber Baru

Timur : Kecamatan Tanggul

Utara : Kecamatan Sumber Baru

Selatan : Kecamatan Kencong dan Kecamatan Umbul sari

Sedangkan jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan:

- a. Desa/ kelurahan terjauh : 7 km
- b. Pusat kedudukan/ wilayah kerja pembantu bupati: 5 km
- c. Pusat ibukota / kabupaten : 35 km
- d. Pusat kedudukan kota administratif : 38 km
- e. Pusat kedudukan wilayah kerja pembantu gubernur: 39 km

Luas kecamatan Semboro secara keseluruhan adalah 2421.969 Ha yang terbagi menjadi 6 desa yaitu:

1. Desa Rejoagung
2. Desa Sidomekar
3. Desa Pondokjoyo
4. Desa Sidomulyo
5. Desa Pondokdalem
6. Desa Semboro

Sedangkan pembagian wilayah dalam dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dusun : 15 Buah
2. Jumlah RW : 115 buah
3. Jumlah RT : 340 buah

Untuk melaksanakan peribangunan di kecamatan Semboro terdapat kader-kader Pembangun Desa dengan data sebagai berikut:

1. Jumlah Kader Pembangun Desa sekecamatan : 27 orang
2. Jumlah Kader Pembangun Desa yang aktif : 14 orang
3. Jumlah Kader Pembangun Desa yang tidak aktif : 13 orang
4. Pembina teknis Kader Pembangun Desa tingkat kecamatan
  - 4.1 Berasal dari kantor kecamatan : 5 orang
  - 4.2 Berasal dari instansi otonomi : 2 orang
  - 4.3 Berasal dari instansi vertikal : 2 orang

## 2.3 Keadaan Demografis

### 2.3.1 Jumlah Penduduk

Dalam pembangunan masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang harus ditangani bersama, sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena jumlah penduduk yang besar tanpa ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang rumit, sehingga akan menghambat proses pembangunan.

Jumlah penduduk kecamatan Semboro adalah 43.855 orang atau terbagi dalam 21.695 jiwa laki-laki, dan 22.160 jiwa wanita. Jumlah tersebut selanjutnya terbagi dalam 10.099 KK.

### 2.3.2 Tingkat Pendidikan Warga

Pendidikan sangat penting artinya di zaman modern ini. Karena pendidikan yang memadai akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Selanjutnya mengenai komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di kecamatan Semboro dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Komposisi Penduduk menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum sekolah	4826	11%
2	Tidak tamat sekolah	5671	12,93%
3	Tamat SD/ sederajat	7542	17,19%
4	Tamat SLTP/ sederajat	5136	11,71%
5	Tamat SLTA/ sederajat	6488	14,79
6	Tamat Akademi	215	0,49
7	Tamat Perguruan Tinggi	154	0,35%
8	Lain-lain	13.823	32,64%

Sumber: Data sekunder kecamatan tahun 1999



Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 43855 jiwa penduduk kecamatan Semboro terdapat 19.535 jiwa yang mengenyam pendidikan sekolah. Dan dari 19.535 orang tersebut, yang paling banyak adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 17,19%, dan yang berpendidikan tinggi hanya 0,35%.

### 2.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk kecamatan Semboro adalah beragama Islam. Selain itu terdapat penduduk yang menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 43 orang atau sebanyak 0,09% saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	41.233	94%
2	Katholik	142	0,32%
3	Kristen	2455	5,59%
4	Hindu	9	0,02%
5	Budha	2	0,004%

Sumber: Data sekunder kecamatan Semboro Th. 1999

### 2.3.4 Mata Pencabarian

Tentang klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5: Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencabarian

No	Mata Pencabarian	Jumlah	Prosentase
1	Petani		
	a. Petani pemilik Tanah	10766	40%
	b. Petani penggarap tanah	78	0,29%
	c. Petani	64	0,23%

	penggarap/Penyekap	
	d. Buruh tani	10.095      37.52%
2	Nelayan	28      0.1%
3	Pengrajin	55      0.2%
4	Buruh Industri	566      2.1%
5	Buruh bangunan	578      2.14%
6	Buruh pertambangan	5      0.01%
7	Buruh perkebunan	773      2.87%
8	Pedagang	1403      5.21%
9	Pengangkutan	4      0.01%
10	Pegawai Negeri Sipil	484      1.8%
11	ABRI	104      0.38%
12	Pensiun	342      1.27%
13	Peternak	
	a. Peternak sapi	1330      4.94%
	b. Peternak kerbau	12      0.04%
	c. Peternak kambing	165      0.61%
	d. Peternak babi	2      0.007%
	e. Peternak ayam	44      0.16%
	f. Peternak itik	6      0.02%
	Jumlah	26.902      100%

Sumber: Data sekunder kecamatan Semboro th. 1999

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan pekerjaan warga di kecamatan Semboro yang terbesar adalah sebagai petani pemilik tanah dengan prosentase 42.47% dan yang keua adalah buruh tani 39.83% dari total pekerjaan penduduk.

## 2.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di kecamatan akan sangat membantu warga dalam aktivitasnya baik itu dibidang ekonomi, keagamaan, maupun pendidikan.

### 2.4.1 Bidang Ekonomi

Prasarana bidang ekonomi yang terdapat dikecamatan Semboro meliputi toko, warung, yang kemudian sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:

- a. Koperasi
  1. Koperasi Simpan Pinjam : 3 Buah
  2. Koperasi unit Desa : 2 Buah
  3. Badan-badan Kredit : 4 Buah
- b. Jumlah Pasar umum : 3 buah
- c. Jumlah pasar bangunan permanen/ semi permanen : 2 Buah  
Jumlah pasar tanpa bangunan permanen/ semi permanen: 1 Buah
- d. Jumlah toko/ kios/ warung : 192 buah
- e. Bank : 1 buah
- f. Jumlah Lumbung desa : 1 buah
- g. Jumlah telepon umum : 1 buah

### 2.4.2 Bidang Transportasi

Prasarana pengangkutan meliputi jalan desa yang beraspal dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan sarana transportasi warga meliputi sepeda, sepeda motor, mobil dan dokar dengan rincian sebagai berikut:

1. Lalu lintas darat melalui jalan aspal
  - a. Kondisi baik : 165 km
  - b. Kondisi sedang : 2 km
  - c. Kondisi rusak : 2 km
2. Lalu lintas darat melalui jalan tanah

- a. Kondisi baik : 66 km
- b. Kondisi sedang : 23 km
- c. Kondisi rusak : 11 km

Sedangkan sarana umum yang dapat digunakan oleh penduduk kecamatan

- a. Sepeda/ ojek : 205 buah
- b. Delaman : 6 buah
- c. Lain-lain ( becak, dll) : 147 buah

### 2.4.3 Bidang Keagamaan

Sarana peribadatan dikecamatan Semboro antara lain:

- a. Masjid : 31 buah
- b. Surau/ musholla : 144 buah
- c. Gereja : 4 buah

### 2.4.4 Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6. Sarana pendidikan yang ada di kecamatan semboro, Kab. Jember

No	Sekolah	Jml. Sklh	Jml.murid	Jumlah pengajar
1	TK	17	4120	85
2	Sekolah Dasar			
	a. SD Negeri	15	2410	94
	b. SD Impres	13	1979	72
	c. SD Swasta Islam	1	82	7
3	SLTP			
	a. SLTP Negeri	1	833	42
	b. SLTP swasta umum	2	440	38
	c. SLTP swasta Islam	2	49	11
	d. SLTP swasta Kath.	1	86	15
4	SMTA swasta umum	1	120	24

Sumber: Data sekunder kecamatan Semboro, 1999

Selain sarana pendidikan seperti yang disebutkan diatas, di kecamatan Semboro juga terdapat pondok pesantren sebagai sarana pendidikan keagamaan yaitu berjumlah 10 buah dengan kyai berjumlah 10 orang, dan memiliki santri 1042 orang.

## 2.4.5 Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di kecamatan semboro, mencakup:

- a. Puskesmas sebanyak 1 buah dengan rata-rata pengunjung terhitung mulai bulan Januari sampai Juni sebanyak 3371, dengan jumlah dokter 2 orang, perawat 2 orang, dan bidan 5 orang.
- b. Praktek dokter : 1 orang
- c. Dukun khitan : 1 orang
- d. Dukun bayi : 26 orang

## 2.5 Kantor Kecamatan Semboro

### 2.5.1 Kondisi Bangunan

Bangunan Kecamatan Semboro dibangun dengan satu lantai yang cukup luas, dibangun dengan biaya pemerintah dan swadaya masyarakat. Disamping itu terdapat pendopo kecamatan yang cukup luas.

Kondisi bangunan yang ada di kecamatan Semboro secara umum menampilkan suasana yang bersih, indah, dan nyaman. Sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan ini cukup memadai, sehingga tugas-tugas kantor dapat terselesaikan dengan baik.

Sedangkan di kecamatan Semboro, terdapat 20 pegawai dengan 8 orang golongan III, 11 orang golongan II, dan 1 orang golongan I.

### 2.5.2 Keadaan Sarana dan Prasarana di kecamatan Semboro

Kecamatan Semboro dibangun diatas tanah yang cukup luas dengan posisi bangunan menghadap ke arah timur. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai

kecamatan dapat berjalan baik apabila ditunjang dengan saran dan prasarana yang memadai. Berikut ini beberapa sarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Daftar inventaris barang di Kantor Kecamatan Semboro, kab. Jember

No	Nama barang	Bahan	Asal perolehan	Thn. perolehan	Jumlah
1	Tanah	Tanah	Yasan	1996	
2	Gedung kantor	Gedung	APBD II	1996	1
3	Gedung pendopo	Gedung	APBD II	1996	1
4	Gedung PKK	Gedung	APBD II	1996	1
5	Mobil St. Wagon	Besi	Tk. I Jatim	1996	1
6	Sepeda motor	Besi	APBD II	1994	2
7	Mesin Tik	Besi	APBD II	1996	5
8	Piling Kabinet	Besi	APBD II	1996	2
9	Meja tulis	Kayu	APBD II	1996	
10	Kursi biasa	Kayu	APBD II	1995	
11	Jam tembok	Besi	APBD II	1995	
12	Kursi Tamu	Kayu	APBD II	1995	
13	Kursi lipat	Besi	APBD II	1995	
14	Almari	Kayu	APBD II	1995	
15	Almari buku	Kayu	Swadaya	1997	
16	Meja rapat	Kayu	APBD II	1996	
17	Papan realisasi	Triplek	Swadaya	1996	
18	Papan data	Triplek	Swadaya	1996	2
19	Papan Struktur	Triplek	APBD II	1996	
20	Telepon	Besi	APBD II	1996	
21	Telepon Fax	Besi	APBD II	1998	
22	Motorola	Besi	APBD II	1996	
23	Tape recorder	Besi	Swadaya	1996	

24	Pompa air	Besi	Swadaya	1997
25	Gambar Presiden	Kertas	Swadaya	1999
26	Gbr. Wk. Presiden	Kertas	Swadaya	1999
27	Gbr. Garuda	Kertas	Swadaya	1999

Sumber: data sekunder kecamatan Semboro, th. 1999

## 2.6 Kepengurusan Kelompok Kerja Teknis Takesra Kukesra

Kepengurusan unit kelompok kerja teknis Takesra Kukesra merupakan pedoman bagi pelaksana dalam melakukan tugas dan kewajiban. Dengan demikian pelaksana akan lebih mudah memahami tugas-tugas, fungsi-fungsi, serta hubungan kerjanya. Dengan diketahui kedudukan masing-masing pelaksana maka keluarga penerima/ penabung Takesra Kukesra sebagai warga kecamatan bersama warga lainnya akan mengetahui siapa-siapa yang menjadi pembina. Oleh karena itu dengan adanya kepengurusan unit pelaksana Takesra Kukesra maka keharmonisan suatu sistem kerja akan tercapai.

Pengurus Takesra Kukesra kecamatan semboro dikelola oleh Petugas KB atau PLKB kecamatan dalam hal penyuluhan, ceramah, pengarahan tentang pelaksanaan Takesra Kukesra maupun tentang jadwal pembinaan, pelayanan, dan penilaian. Adapun kepengurusan unit kelompok kerja teknis di kecamatan Semboro dapat dilihat sebagai berikut:

Kepengurusan Unit kelompok kerja teknis program Tkesra Kukesra di kecamatan Semboro:

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Pengawas PLKB
3. Anggota : kepala kantor Pos Pembantu

Pemimpin kantor cabang Bank BNI

PLKB

Kaur Kesra

Kaur PMD

## Tim Penggerak PKK

Tugas pokok dari masing-masing unit kelompok kerja teknis Takesra Kukesra terdiri dari:

### 1. Ketua dijabat oleh camat

Ketua mempunyai fungsi antara lain:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan Takesra Kukesra
- b. Secara khusus melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelaksanaan Takesra Kukesra secara efektif dan efisien
- c. Melaksanakan orientasi, pemantauan, dan bimbingan teknis ditingkat kecamatan

### 2. Sekretaris dijabat oleh 1-PLKB ( Petugas Pengawas apangan Keluarga Berencana)

Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam pelaksanaan Takesra Kukesra. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Mengawasi dan membina kegiatan PLKB/ PKB dan kelompok usaha/ UPPKS
- b. Ikut mengetahui kebenaran formulir permohonan kredit dan anggota kelompok usaha/ UPPKS
- c. Membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif melalui aktifitas kelompok usaha/ UPPKS bersama-sama dengan PLKB/PKB

### 3. Anggota terdiri dari:

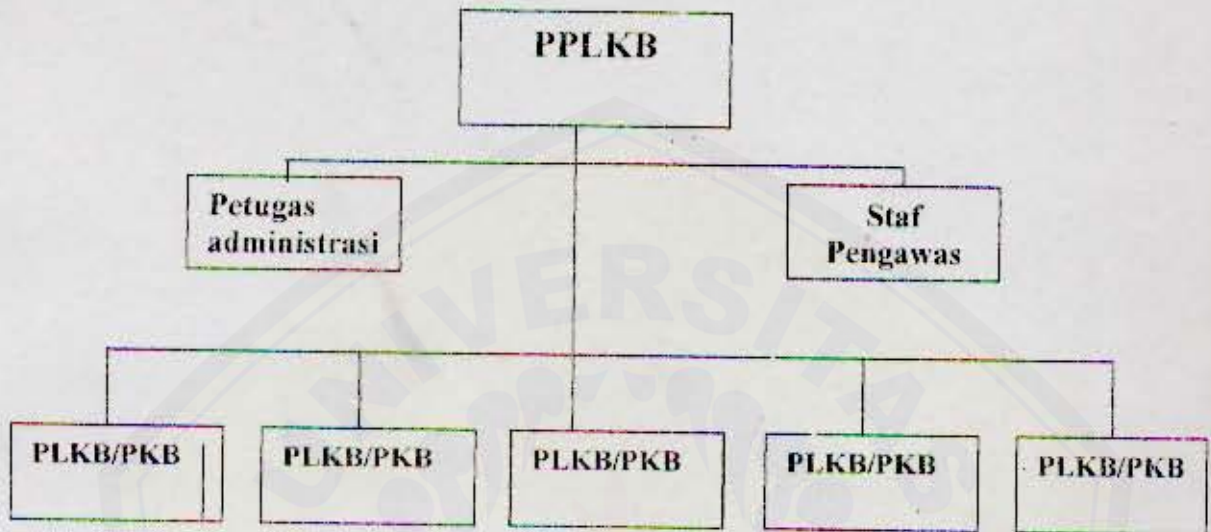
#### 1. Kantor pos Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Memproses permohonan pinjaman Kukesra yang diajukan oleh ketua usaha/ UPPKS setelah disetujui oleh PLKB/PKB dan diketahui oleh kepala desa/ lurah/ PPLKB
- b. Memutuskan dan menandatangani permohonan pinjaman kukesra samapai dengan Rp. 5 Juta (perkelompok) dan meneruskan berkas permohonan pinjaman kukesra dan daftar anggota kelompok usaha/ UPPKS beserta rekapnya ke kantor pos pelaksana



- c. Meneruskan berkas permohonan pinjaman Kukesra diatas Rp. 5 Juta perkelompok beserta daftar anggota kelompok usaha/ UPPKS ke bank BNI padanan melalui kantor pos pelaksana
  - d. Menandatangani perjanjian pinjaman Kukesra selaku kuasa dari Bank BNI dengan ketua kelompok usaha/ UPPKS selaku dan langsung membayarkan Kukesra sampai dengan Rp. 5 Juta sejauh kondisi dikantor pos pelaksana memungkinkan
  - e. Melayani setoran angsuran pinjamar, kelompok usaha serta membukukan di rekening kelompok usaha
2. Kantor Cabang Pembantu BNI mempunyai fungsi:
- a. Melayani permintaan penarikan dana diatas RP. 5 Juta perkelompok
  - b. Memutuskan pemberian Kredit diatas Rp. 5 Juta perkelompok
  - c. Membukukan rekening pinjaman kelompok dan rekening Takesra kelompok
  - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu dengan BKKBN, PT. Pos Indonesia.
3. PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)
- a. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kebenaran data anggota kelompok usaha yang diajukan oleh ketuanya
  - b. Bersama kelompok usaha mengisi formulir permohonan kredit dan data anggota kelompoknya serta menandatangani formulir data anggota kelompok usaha
  - c. Bersama dengan ketua kelompok usaha meneruskan permohonan kredit dan data para anggota kelompok usaha ke kantor pos pelaksana setelah diketahui oleh kepala desa/ lurah/ PPLKB
  - d. Mengingatkan ketua kelompok usaha untuk menagih kewajiban debitur untuk angsuran pokok pinjaman dan bunganya kepada para anggota kelompok usaha

Struktur Organisasi BKKBN tingkat kecamatan



Keterangan

- PPLKB : Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana
- PPKBD : Pengawas Penyuluh Keluarga Berencana Desa
- PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana
- PKB : Penyuluh Keluarga Berencana

### BAB III

## PENYAJIAN VARIABEL PENELITIAN DAN HASIL PENGUKURAN

### 3.1 Pengantar

Sebelum melangkah pada tahap analisa data maka terlebih dahulu penulis menyajikan data- data dari variabel penelitian. Juga akan dipaparkan tentang data- data primer, berupa data-data berdasarkan skor dari jawaban responden terhadap sejumlah jawaban pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan indikator-indikator yang ada. Data yang terkumpul dari masing-masing variabel kemudian diperoleh secara teratur dan sistematis sehingga menghasilkan data yang siap dianalisa, untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Berkaitan dengan hal ini maka dalam penelitian ini data yang disajikan harus bersifat obyektif. Demikian juga data yang penulis sajikan dalam penelitian diperoleh secara obyektif berdasarkan jawaban-jawaban kuisisioner yang diberikan responden dan didukung oleh data-data hasil dari interview.

Adapun data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk variabel-variabel dibawah ini :

### 3.2 Variabel Independen (Variabel X) yaitu hubungan kerja BKKBN

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program, dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembangunan dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembangunan.

Dari pendapat diatas hubungan kerja BKKBN sebagai variabel independen diharapkan memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini hubungan kerja BKKBN sebagai variabel pengaruh dirumuskan kedalam tiga indikator yaitu :

- a. Pengorganisasian
- b. Pelayanan Takesra Kukesra
- c. Pembinaan Takesra Kukesra.

Ketiga indikator diatas diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup relevan terhadap variabel Y yaitu efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra di kecamatan Tanggul kabupaten Jember.

Selanjutnya penulis sajikan masing-masing indikator dari kaitan hubungan kerja BKKBN sebagai berikut :

### 3.2.1 Pengorganisasian (X1)

Untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Takesra Kukesra disetiap tingkatan wilayah dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/ kodya dan tingkat kecamatan dibentuk kelompok kerja teknis Takesra Kukesra yang anggotanya adalah unsur-unsur dari Kantor Negara Kependudukan/ BKKBN, Bank BNI, PT Pos Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri serta unsur-unsur lain yang dianggap perlu dan terkait. Pokjanis ini merupakan salah satu kelompok kerja dari Pokjanal pembangunan keluarga sejahtera.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengorganisasian pelaksanaan Takesra Kukesra dapat dilihat dari jawaban responden terhadap item-item sebagai berikut :

- a. Pemilihan orang yang tepat yang tergabung dalam kelompok kerja teknis. Tepat dalam hal ini sesuai dengan kemampuan dan jabatan untuk melakukan tugas yang dibebankan.
- b. Pembagian pekerjaan "kepada orang " ini yaitu pada petugas pelaksana program yang tergabung dalam kelompok teknis dan pada waktu yang sama menetapkan tanggung jawab dan wewenang mereka.
- c. Menyuruh "orang ini" yaitu para petugas pelaksana dari BKKBN sendiri maupun dari instansi yang lain untuk bekerja sama dalam melaksanakan program sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemilihan alat-alat pembantu teknis yang tepat, termasuk pemilihan "prosedur dan teknologi" efisien.

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator pengorganisasian pelaksanaan program Takesra Kukesra dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 8. Skor Pengukuran Jawaban Terhadap Pengorganisasian

NO	Item Skor				Total skor
	1	2	3	4	
1	3	2	2	1	8
2	3	2	2	1	8
3	3	2	2	1	8
4	2	2	2	1	7
5	3	1	1	3	8
6	3	3	2	1	9
7	3	2	2	1	8
8	3	2	3	1	9
9	3	3	1	3	10
10	3	2	1	1	7
11	3	1	2	3	9
12	3	2	2	1	8

Sumber: Data Primer diolah

## 2.2 Pelayanan Takesra Kukesra (X2)

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepuasan kepada orang lain. Pelayanan Takesra Kukesra diberikan melalui Kantor Pos Pelaksana. Setiap penabung dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang telah memiliki Takesra akan memperoleh bantuan Kukesra untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan yang diberikan BKKBN dan lembaga lain yang terkait dalam program Takesra Kukesra dapat dilihat dari jawaban responden terhadap item- item sebagai berikut:

- a. Pelayanan mengenai pengadaan, pembukuan, penyetoran, dan pengambilan Takesra Kukesra yang dalam hal ini ditangani oleh P.T Pos Indonesia.

- b. Pelayanan pemanfaatan dana Kukesra untuk pengembangan ekonomi produktif sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator pelayanan Kukesra adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Skor Pengukuran Jawaban Terhadap Pelayanan Takesra Kukesra

No	Item Skor		Total Skor
	1	2	
1	2	3	5
2	3	3	6
3	3	3	6
4	2	2	4
5	3	2	5
6	3	2	5
7	3	2	5
8	3	2	5
9	2	3	5
10	2	2	4
11	2	2	4
12	3	2	5

Sumber: Data primer diolah

### 3.2.3 Pembinaan Takesra Kukesra (X3)

Kegiatan pembinaan dimaksudkan agar pelayanan Takesra Kukesra dapat berjalan serta memberikan dampak kepada pengembangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Pada pelaksanaan program Takesra Kukesra, pembinaan ditujukan kepada:

1. Penabung atau penerima Takesra Kukesra yang antara lain dalam bentuk penyuluhan, bimbingan usaha, dan lain- lain yang bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pemahaman dari pengertian hakekat dan kebersamaan tanggung renteng dalam Kukesra, sedangkan bimbingan usaha untuk memberikan pemecahan masalah bagi yang mengalami kesulitan dalam pemanfaatan kredit.
2. Pembinaan kepada petugas yang terlibat dalam pelayanan Takesra Kukesra yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat, wawasan, pengetahuan dan keterampilan para petugas agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
3. Pembinaan kepada kelompok usaha yang bertujuan agar kelompok usaha/ UPPKS tetap berjalan dinamis dan berkembang serta menjadi semakin efektif sebagai wadah pembinaan kemitrausahaan, kemitrausahaan, dan sarana pelayanan Takesra Kukesra.

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item- item dari indikator pembinaan Takesra Kukesra adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Skor Pengukuran Jawaban Terhadap Pembinaan Takesra Kukesra

No	Item Skor			Total skor
	1	2	3	
1	3	2	3	8
2	2	2	3	7
3	2	2	3	7
4	2	2	6	6
5	3	2	3	8
6	3	2	2	7
7	2	3	2	7
8	2	3	3	8
9	2	2	2	6
10	2	2	2	6
11	2	3	2	7
12	1	2	3	6

Sumber: Data Primer Diolah



Selanjutnya data untuk masing-masing variabel diatas dapat digabung dalam satu tabel yaitu merupakan data keseluruhan dari variabel Hubungan Kerja BKKEN sebagai berikut:

Tabel 11. Kategori Jawaban Terhadap Pengorganisasian (X1), Pelayanan Takesra Kukesra (X2), dan Pembinaan Takesra Kukesra (X3)

No	Skor Indikator			Total Skor	Kategori
	X1	X2	X3		
1	8	5	8	21	tinggi
2	8	6	7	21	tinggi
3	8	6	7	21	tinggi
4	7	4	6	20	sedang
5	8	5	8	21	tinggi
6	9	5	7	21	tinggi
7	8	5	7	20	sedang
8	9	5	8	21	tinggi
9	10	5	6	21	tinggi
10	7	4	6	20	sedang
11	9	4	7	20	sedang
12	8	5	6	19	sedang

Sumber: Data primer diolah

### **3.3 Variabel Dependen (Y), Yaitu Efektifitas Pelaksanaan Program Takesra Kukesra**

Efektifitas pelaksanaan program adalah tingkat pencapaian yang layak dicapai sesuai yang dikehendaki program. Sehingga supaya sesuai dengan yang dikehendaki maka program- program tersebut harus berorientasi pada tujuan program itu sendiri. Dalam hal ini program Takesra Kukesra bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Dan terealisasinya tujuan program tidak terlepas dari peran lembaga lokal dan lembaga pusat.

Menyimak uraian diatas, maka dalam penulisan ini efektifitas pelaksanaan program menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/ masyarakat.
- b. Kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota

#### **3.3.1 Kesesuaian Antara Organisasi Yang Menetapkan Program Itu Dengan Penyampaian Pelayanan Kepada Anggota/ Masyarakat (Y1)**

Untuk menetapkan suatu keberhasilan ataupun efektifitas pelaksanaan Takesra Kukesra maka harus ada kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu yaitu BKKBN dengan penyampaian pelayanan kepada anggota/ masyarakat.

Adapun untuk menggali data yang berkaitan dengan kesesuaian antara organisasi yang menetapkan program itu dengan penyampaian pelayanan kepada anggota masyarakat dapat diukur dengan item- item berikut:

1. Kekhususan program Takesra Kukesra menyangkut sasaran yaitu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
2. Penciptaan hubungan kerjasama antara BKKBN dengan instansi lain
3. Pelayanan kepada penerima atau penabung Takesra Kukesra

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator kesesuaian antara oraganisasi yang menetapkan program dengan penyampaian pelayanan kepada anggota sebagai berikut:

Tabel 12. Skor Pengukuran Jawaban Terhadap Kesesuaian Antara Organisasi yang menetapkan Program Dengan Penyampaian Pelayanan Kepada Anggota.

No	Item Skor			Total Skor
	1	2	3	
1	2	3	2	7
2	2	3	2	7
3	2	3	3	8
4	3	3	2	8
5	3	2	3	8
6	2	3	3	8
7	2	3	3	8
8	3	1	3	7
9	2	3	3	8
10	2	3	2	7
11	3	1	3	7
12	3	3	1	7

Sumber: Data Primer Diolah

### 3.3.2 Kemampuan Untuk Mewujudkan Partisipasi Anggota (Y2)

Dalam upaya untuk mencapai keluarga bahagia sejahtera, partisipasi pelaksanaan program dalam menarik minat peserta program sangat penting. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun untuk menganalisa data berkaitan dengan kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota dapat diolah dengan item-item sebagai berikut:

- Mobilitas sumber-sumber lokal yaitu peranan anggota
- Pengumpulan informasi (kegiatan rapat)
- Peningkatan kehidupan anggota
- Kesediaan pengadaan pembiayaan untuk kelangsungan program

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator kemampuan untuk mewujudkan partisipasi anggota adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Skor Pengukuran Jawaban Terhadap Kemampuan Untuk Mewujudkan Partisipasi Anggota

No	Item Skor				Total Skor
	1	2	3	4	
1	3	1	2	2	8
2	3	2	2	2	9
3	3	1	2	2	8
4	3	1	1	1	7
5	3	1	3	1	8
6	3	2	1	2	8
7	3	1	2	2	8
8	2	2	2	2	8
9	3	1	2	2	8
10	2	2	3	2	7
11	3	2	2	2	9
12	2	2	1	2	7

Sumber: Data Primer diolah

Selanjutnya data untuk masing-masing indikator diatas dapat disajikan dalam satu tabel yaitu merupakan data keseluruhan dari variabel Efektifitas pelaksanaan Program Takesra Kukesra (Y).

Tabel 14. Kategori Jawaban Terhadap Kesesuaian Antara Organisasi Yang Menetapkan Program Dengan Penyampaian Pelayanan Kepada Anggota (Y1) dan Kemampuan Untuk Mewujudkan Partisipasi Anggota (Y2)

No	Indikator		Total Skor	Kategori
	Y1	Y2		
1	7	8	15	sedang
2	7	9	16	sedang
3	8	8	16	sedang
4	8	7	15	sedang
5	8	8	16	sedang
6	8	8	16	sedang
7	8	8	16	sedang
8	7	8	15	sedang
9	8	8	16	sedang
10	7	7	14	sedang
11	7	9	16	sedang
12	7	7	14	sedang

Sumber: Data Primer Diolah

### 3.4 Variabel intervening (Z) Dukungan Lembaga Pusat

Hubungan antara lembaga lokal dan lembaga pusat menunjukkan adanya dua fungsi pokok yaitu adanya fungsi pengawasan dan adanya bantuan tujuan hubungan yang berbentuk pengawasan ini ialah memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan aspek pelaksanaan yang lain. Bantuan teknik dan personil utamanya bantuan staf dapat juga digunakan untuk mempengaruhi organisasi lokal, tetapi sebaliknya organisasi lokal dapat dapat mengawasi pusat dengan mengadakan perwakilan. Tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah memberikan bantuan yaitu berupa keuangan, pelayanan dan umumnya bantuan teknik dan personil merupakan fungsi fasilitas.

Tetapi pada umumnya setiap bantuan selalu diikuti dengan pengawasan, biasanya ditentukan dengan peraturan. Jadi sebenarnya bentuk pengawasan serta bentuk bantuan yang diberikan oleh badan-badan pelaksana tingkat nasional untuk lancarnya pelaksanaan program, menentukan efektifitas pelaksanaan program itu sendiri .

Dari uraian diatas dukungan lembaga pusat dirumuskan dalam dua indikator yaitu:

1. Bantuan
2. Pengawasan

### 3.4.1 Bantuan (Z1)

Tujuan hubungan yang berupa bantuan ini adalah memberikan bantuan berupa keuangan, pelayanan dan umumnya bantuan teknik dan personil merupakan fungsi fasilitas. Bantuan ini timbul, biasanya organisasi lokal mempunyai kepentingan tertentu untuk menerapkan suatu program tetapi masih kurang dibidang lainnya. Sehingga indikator bantuan dapat ditarik item-item sebagai berikut:

1. Keuangan
2. Teknis/ personil
3. Pelayanan
4. Perwakilan

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator bantuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 15. Skor pengukuran jawaban terhadap bantuan

No	Item Skor				Total Skor
	1	2	3	4	
1	3	1	2	2	8
2	2	1	2	2	7
3	3	1	2	1	7
4	3	1	2	2	8
5	3	1	2	2	8
6	3	1	2	2	8
7	3	1	2	1	7
8	3	1	2	2	8
9	3	1	2	2	8
10	3	1	2	1	7
11	3	1	2	2	8
12	3	1	2	1	7

Sumber: Data primer diolah

### 3.4.2 Pengawasan (Z2)

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Sehingga dari uraian diatas fungsi pengawasan dapat diturunkan menjadi item-item:

1. Macam peraturan yang diberikan
2. Pengawasan keuangan
3. Pemeriksaan buku-buku/ administrasi

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Skor pengukuran jawaban terhadap pengawasan

No	Item skor			total skor
	1	2	3	
1	3	1	3	7
2	3	1	3	7
3	3	2	3	8
4	3	1	3	7
5	3	1	3	7
6	3	1	3	7
7	3	1	3	7
8	3	1	3	7
9	3	2	3	8
10	3	1	3	7
11	3	1	2	6
12	3	1	2	6

Sumber: Data primer diolah

Selanjutnya data untuk masing-masing indikator diatas dapat digabung dalam satu tabel yaitu merupakan data keseluruhan dari variabel dukungan lembaga pusat

Tabel 17. Kategori jawaban terhadap bantuan (Z1) dan pengawasan (Z2)

No	Skor indikator		Total Skor	Kategori
	Z1	Z2		
1	7	8	15	sedang
2	7	7	14	sedang
3	8	7	15	sedang
4	7	8	15	sedang
5	7	8	15	sedang
6	7	8	15	sedang
7	7	7	14	sedang
8	7	8	15	sedang
9	8	8	16	sedang
10	7	7	14	sedang
11	6	8	14	sedang
12	6	7	13	sedang



Tabel 18. Total Kategori Jawaban Terhadap Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lembaga Pusat (X) dan Efektifitas Pelaksanaan Program Takesra Kukesra (Y)

No	Total Skor		Kategori (X)	Kategori (Y)	Kategori (Z)	
	X	Y				Z
1	21	15	15	tinggi	sedang	sedang
2	21	16	14	tinggi	sedang	sedang
3	21	16	15	tinggi	sedang	sedang
4	20	15	15	tinggi	sedang	sedang
5	21	16	15	sedang	sedang	sedang
6	21	16	15	tinggi	sedang	sedang
7	20	16	14	tinggi	sedang	sedang
8	21	15	15	sedang	sedang	sedang
9	21	16	16	tinggi	sedang	sedang
10	20	14	14	tinggi	sedang	sedang
11	20	16	14	sedang	sedang	sedang
12	19	14	13	sedang	sedang	sedang

Sumber: Data Primer Diolah

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kecamatan Semboro kabupaten Jember yang penulis berjudul "Kaitan hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra di kecamatan Semboro kabupaten Jember", dan setelah penulis selesai menyajikan data dan menganalisa serta mengajukan hipotesis terhadap variabel yang tercakup dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa data statistik, variabel X, variabel Y, variabel Z telah ditentukan bahwa korelasi antara hubungan kerja BKKBN (variabel X) dan efektifitas pelaksanaan (variabel Y) adalah  $\delta_{xy} = 0,61$  selain itu penulis juga telah menentukan bahwa korelasi antara hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat adalah  $\delta_{xz} = 0,79$  dan dari data yang tersaji dalam tabel dapat segera kita tentukan dengan menggunakan rumus :

$$\delta = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - Tx} \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - Ty}}$$

Bahwa korelasi antara dukungan lembaga pusat dengan efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra adalah 0,37. Dengan demikian, dapat kita tentukan harga  $\delta_{y,z}$  dengan memakai rumus :

$$\delta_{y,z} = \frac{\delta_{yz} - \delta_{xy}\delta_{xz}}{\sqrt{(1-\delta_{xy}^2)(1-\delta_{xz}^2)}}$$

Telah kita tentukan bahwa jika dukungn lembaga pusat diparsialkan, korelasi antara hubungan kerja BKKBN dengan efektifitas pelaksanaan program adalah  $\delta_{y,z} = 0,95$ . Karena harga ini lebih besar daripada  $\delta_{xy} = 0,61$  kita dapat menyimpulkan bahwa kaitan antara hubungan kerja BKKBN dan efektifitas pelaksanaan program relatif bergantung pada dukungan lembaga pusat.

2. Berdasarkan analisa data deskriptif yang ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana kaitan hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra juga menunjukkan adanya kaitan yang nyata dimana dapat dilihat dalam tabel 26 bahwa bila hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat makin baik dilakukan maka akan mengakibatkan efektifitas pelaksanaan program semakin tinggi.

## 5.2 Saran

Sesuai dengan apa yang penulis bahas dan penulis simpulkan dapat dikatakan bahwa peningkatan hubungan kerja BKKBN dan dukungan lembaga pusat akan menyebabkan peningkatan efektifitas pelaksanaan program Takesra Kukesra. Maka sebagai saran bagi BKKBN dan lembaga pusat yang terkait dalam pelaksanaan program hendaknya lebih meningkatkan hubungan kerja baik melalui pengorganisasian, pelayanan Takesra Kukesra, dan juga pembinaan Takesra Kukesra. Sehingga efektifitas pelaksanaan program akan meningkat dan tujuan program yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen L.A, 1961, Karya Management terjemahan J. MA Tan Aure, PT. Pembangunan, Jakarta
- Adam I. Tanuwidaya, Drs, 1985, Perilaku Organisasi, Sinar Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjoyo, 1984, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- ✓ BKKBN, Petunjuk Pelaksanaan Takesra Kukesra dalam Rangka Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera, BKKBN Jawa Timur
- David K. Leonard dan Dale Marshall, 1982, Institution of Rural Development for the Poor, University of California, berkeley, Institute of International Studies
- Dimock-Dimock-Fox, Administrasi Negara, Jakarta
- ✓ F. Sugeng Isranto, SH, Beberapa segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia, FISIP UGM Yogyakarta, Yogyakarta
- George Strauus dan Leonard Sayless, 1986, Manajemen Personalita, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ✓ John F. Due, Keuangan Negara, Perekonomian Dari Sektor Pemerintah, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1991, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, Sistem Administrasi Negara Jilid II, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
- Mongit. A, 1996, Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan
- Michael P. Todaro, 1984, Ekonomi Untuk Negara berkembang Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Michael P. Todaro, 1978, Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- ✓ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Methode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES
- Paul B. Hortoa, Chester L. Hunt, 1992, Sosiologi jilid 2, Jakarta, Erlangga
- Pariatra Westra, 1981, Ensiklopedia Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.

Soewarno Handayaniingrat, 1989, Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Shinichi Ichimura, 1989, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Sidney Siegel, 1994, Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu sosial, Gramedia, Jakarta.

The Liang Gie, 1992, Pengertian, Kedudukan dan Perumusan Ilmu Administrasi, Liberty Jaya, Yogyakarta.

Universitas Terbuka, 1988, Hubungan Keteraga kerjaan, Jakarta, Karunika Jakarta.

-----, 1996, Buku II Petunjuk Umum Pengelolaan Takesra Kukesra, Jakarta, BKKBN.

-----, 1996, Buku IV, Petunjuk Umum Pegembangan Dinamika Kelompok UPPKS Takesra Kukesra, Jakarta, BKKBN.

-----, 1996, Petunjuk Umum Kewirausahaan, Jakarta, BKKBN.

-----, 1996, Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan kemiskinan, Jakarta, BKKBN.

-----, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Takesra Kukesra, Surabaya, BKKBN Kanwil Jatim

Kemiskinan, Jakarta, BKKBN.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR KUISIONER  
(ANGKET)

I. Identitas penulis

Nama : YUANA  
NIM : EIC195182  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat : Jl. Kalimantan X/66 Jember

II. Pengantar

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, penulis diharuskan menyelesaikan skripsi, adapun judul skripsi yang penulis susun adalah:

KAITAN HUBUNGAN KERJA BKKBN DAN DUKUNGAN LEMBAGA PUSAT DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM TAKESRA KUKESRA DI KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

Guna melengkapi data yang dibutuhkan, kami mohon dengan hormat kesediaan ibu/saudara untuk membantu mencapai tujuan penelitian ini dengan mengisi daftar pertanyaan yang penulis sediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu ibu/saudara ketahui, dalam penulisan ini hanya untuk kepentingan ilmiah semata, dan kerahasiaan dari jawaban yang diberikan kami akan jaga sepenuhnya.

Atas kesediaan ibu/saudara meluangkan waktu untuk mengisi daftar kuisisioner ini kami mengucapkan banyak terima kasih serta sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.

Hormat Kami

YUANA

## III. Petunjuk Pengisian

Dalam angket yang penulis buat ini, terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Bagian A: identitas responden

(Ibu/ saudara cukup mengisi pada tempat yang telah disediakan)

b. Bagian B: daftar pertanyaan

(mohon ibu / saudara memberi tanda silang (X) pada jawaban dianggap paling benar)

### Identitas responden

1. Nama :
2. Pendidikan :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

### Daftar Pertanyaan

#### A. Variabel Hubungan Kerja BKKBN

1. Bagaimana pendapat kelompok saudara terhadap para petugas pelaksana Takesra Kukesra ( baik dari BKKBN maupun dari instansi lain) yang sekarang ini apakah kelompok anda sudah merasa cocok?
  - a. Sangat cocok
  - b. Kurang cocok
  - c. Tidak cocok
1. Bagaimana pendapat kelompok saudara terhadap sikap para petugas pelaksana Takesra Kukesra bilamana kelompok anda sangat membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan program, apakah mereka memperhatikan dan memberikan bantuan?
  - a. Selalu memberikan bantuan
  - b. Kadang-kadang memberikan bantuan
  - c. Tidak pernah memberikan bantuan
2. Menurut kelompok saudara dalam kegiatan yang menyangkut program Takesra Kukesra (misalnya penyuluhan, pendataan, dll) apakah petugas BKKBN selalu bersama dengan petugas dari instansi lain (misal dari Bank BNI, kantor pos, dll)
  - a. Selalu bersama dengan petugas instansi lain

- b. Kadang-kadang dengan petugas instansi lain
  - c. Tidak pernah dengan petugas instansi lain
3. Bilamana Program Takesra Kukesra yang dikelola BKKBN yang ternyata berjalan lancar, apakah program tersebut ditangani sendiri atau mendapatkan bantuan dari lembaga lain?
  - a. sepenuhnya ditangani sendiri
  - b. kadang-kadang mendapat bantuan
  - c. mendapat bantuan sepenuhnya
4. Menurut kelompok saudara apakah pelayanan tentang Takesra Kukesra ( menyangkut tentang pembukuan, penyetoran, pengambilan) sudah memuaskan kelompok anda?
  - a. Sudah memuaskan
  - b. Kadang- kadang memuaskan
  - c. tidak memuaskan
5. Dalam memanfaatkan dana Kukesra untuk pengembangan usaha ekonomi anda apakah kelompok saudara mendapatkan bantuan dari petugas pelaksana (misal: tenaga, pikiran)?
  - a. Selalu mendapatkan bantuan
  - b. Kadang-kadang mendapatkan bantuan
  - c. Tidak pernah mendapatkan bantuan
6. Menurut kelompok saudara apakah petugas pelaksana Takesra Kukesra (baik dari BKKBN maupun dari instansi lain) sering mengadakan kegiatan bimbingan atau pembinaan yang berupa penyuluhan, ceramah, dll?
  - a. Sering
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak pernah
7. Sepengetahuan kelompok saudara apakah juga sering dilakukan pembinaan terhadap petugas yang terlibat didalam pelayanan Takesra Kukesra baik melalui forum pertemuan maupun peorangan (misal melalui kunjungan dilapangan)
  - a. Sering
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
8. Apakah kelompok usaha/ UPPKS anda sering didatangi oleh petugas pelaksana program untuk membicarakan tentang kegiatan ekonomi produktif kelompok usaha anda?



- a. Sering didatangi      b. Kadang-kadang didatangi      c. Tidak pernah didatangi

## Variabel (Y)

1. Bagaimana pendapat kelompok saudara apakah program Takesra Kukesra sesuai dengan kebutuhan kelompok anda? (misal: tentang dana kredit)
  - a. Sudah sesuai
  - b. Belum sepenuhnya sesuai
  - c. Tidak sesuai
2. Apakah petugas pelaksana Takesdra Kukesra yang menangani program itu berasal dari BKKBN sendiri?
  - a. Ya, dari BKKBN sendiri
  - b. Kadang-kadang mendapat bantuan dari luar
  - c. Sepenuhnya mendapat bantuan dari luar
3. Apakah kelompok saudara menemui masalah dalam hal pelayanan (misal: pembukuan, penyetoran, pengambilan dana, dll) Takesra Kukesra
  - a. Tidak pernah      b. kadang-kadang      c. Sering
4. Dalam UPPKS anda bergabung apakah anggota juga ikut berusaha dalam kegiatan ekonomi produktif?
  - a. Ya, ikut berusaha
  - b. Kadang- kadang ikut berusaha
  - c. Tidak pernah
5. Menurut kelompok saudara apakah sering diadakan rapat bersama dengan petugas pelaksana program Takesra Kukesra untuk membicarakan program?
  - a. Sering diadakan rapat
  - b. Kadang- kadang diadakan rapat
  - c. Tidak pernah diadakan rapat
6. Menurut kelompok saudara apakah setelah memanfaatkan dana Takesra Kukesra kehidupan ekonomi anggota kelompok anda meningkat?
  - a. Ya, semakin meningkat

- b. Kadang-kadang meningkat
  - c. Tidak pernah meningkat
7. Apakah kredit Kukesra yang kelompok anda terima selalu berjalan lancar?
- a. Selalu lancar
  - b. Kadang-kadang lancar
  - c. Tidak lancar

## Variabel (Z)

1. Bagaimana pendapat kelompok saudara , apakah sudah merasa cocok dengan peraturan yang menyangkut tentang Takesra Kukesra yang diberlakukan ?
- a. cocok
  - b. Kurang cocok
  - c. Tidak cocok
2. Menurut kelompok saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan , apakah ada wakil dari pusat yang mengawasi? (bukan dari BKKBN)
- a. Sering
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
3. Apakah dalam waktu-waktu tertentu kelompok saudara pernah mendapatkan laporan-laporan tentang keuangan yang menunjukkan adanya pemeriksaan dari pusat?
- a. Sering
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
4. Menurut kelompok anda apakah kredit yang diajukan lancar?
- a. Selalu lancar
  - b. Kadang lancar
  - c. Tidak pernah lancar
5. Apakah tenaga teknis/ keterampilan yang menangani program Takesra Kukesra itu pernah berasal dari pusat?
- a. Sering
  - b. kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
6. Apakah kebutuhan-kebutuhan kelompok anda yang berhubungan dengan Takesra Kukesra dapat dipenuhi?
- a. Selalu dipenuhi
  - b. Kadang dipenuhi
  - c. Tidak pernah terpenuhi
7. Sepengetahuan kelompok saudara apakah ada wakil dari pusat yang menangani program Takesra Kukesra ini?
- a. Selalu ada
  - b. Kadang-kadang ada
  - c. Tidak pernah ada



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121  
E-mail : lemlit\_unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : 836/J25.3.1/PL.5/2000

07 Agustus 2000

Lampiran :  
Perihal :

**Permohonan ijin mengadakan Penelitian**

Kepada :

**Yth. Sdr. Kakansospol  
Pemda Kabupaten Tk. II Jember  
di -  
JEMBER.**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data

Nama / NIM / Jurusan : YUANA / E1C1 95182 / AN  
~~Dosen~~ / Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
A l a m a t : Jl. Kalimantan X / 66 Jember.  
Judul Penelitian : Kaitan Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lem-  
baga Pusat Dalam Menunjang Efektivitas Pelaksanaan  
Program Takesra Kukesra di Kecamatan Semboro  
Kabupaten Jember.  
Di Daerah : Kec. Seboro, Kab. Jember.  
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Bapak untuk memberikan ijin kepada ~~dosen~~ / Mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember
2. ~~Dosen~~ / Mahasiswa ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
Jember, 07 Agustus 2000  
JEMBER

Jember, 07 Agustus 2000

Surat : 07/078.4330.36/2000  
Materi : Pengantar  
Tempat :  
Nomor : SURVEY PENELITIAN

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat Kertosono  
di  
J E M B E R

Layar Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Info Jember, Tanggal 07 Agustus 2000, Nomor : 07/078.4330.36/2000, perihal permohonan izin Survey / research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan Survey Research di atas, diminta kepada Sdr. Camat memberikan bantuan berupa surat / keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D i s t r i b u s i :  
1. YUANA PENGABDIAN ADMINISTRASI NEGARA  
2. Sdr. KALIMANTAN K. S. JEMBER  
3. Sdr. FAR. M. S. JEMBER  
4. SURVEY PENELITIAN  
D i s t r i b u s i :  
KANTON SUBBANG KERJA BAKEM DAN MENDUKA  
LEMBAGA PUSAT DALAM MERANGKAI EFISIENSI  
PELAKSANAAN PROGRAM TAREKRA MUNDUK DI  
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN JEMBER  
W a k t u : 07 AGUSTUS 2000 S/D 07 OKTOBER 2000.  
Reperda : -

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. BUPATI JEMBER



- 1. Kepala Dinas Kesehatan
- 2. Kepala Dinas Sosial
- 3. Kepala Dinas Pendidikan
- 4. Kepala Dinas Pertanian
- 5. Kepala Dinas Perikanan
- 6. Kepala Dinas Koperasi
- 7. Kepala Dinas Perhubungan
- 8. Kepala Dinas Kebudayaan
- 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 13. Kepala Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Kesejahteraan
- 14. Kepala Dinas Hukum dan Pemerintahan
- 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 16. Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
- 17. Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
- 18. Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan

**CAMAT SEMBORO**

Jalan Kamardikan Nomor 1 Semboro Telp. (0336) 441911  
SEMBORO 68157

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 072/566/436,564/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Camat Semboro Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Y U A N A  
N i m : EIC 195182  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Negara,  
Judul skripsi : Kaitan Hubungan Kerja BKKBN dan Dukungan Lembaga Pusat dalam menunjang EFEKTIFITAS pelaksanaan program TAKESRA - KUKESRA di - Kecamatan Semboro,  
A l a m a t : Jln, Kalimantan X , 166 Jember,

Orang tersebut benar - benar telah melaksanakan survey di wilayah Kecamatan Semboro terhitung mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan 7 Oktober 2000,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan seperlunya,

Semboro, 06 September 2000,

CAMAT SEMBORO  
SUNARSONO, SH,